

**INOVASI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS STUDI PADA PAYUNGI
METRO LAMPUNG**

DISERTASI

Oleh

**MULYADI
NPM. 2036011009**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**INOVASI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS STUDI PADA PAYUNGI
METRO LAMPUNG**

Oleh

MULYADI

Disertasi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN**

Pada

**Program Doktor Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
INOVASI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS STUDI PADA PAYUNGI
METRO LAMPUNG

Oleh

Mulyadi

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Value-Embedded Social Innovation–Pancadaya (VESI–Pancadaya) sebagai kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi sosial yang menjelaskan mekanisme transformasi dari integrasi nilai menuju keberlanjutan multidimensi komunitas dalam konteks sub/peri-urban. Studi dilakukan pada Komunitas Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), Kota Metro, Lampung, yang berhasil mempertahankan keberlanjutan inovasi sosial selama lebih dari tujuh tahun.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan kunci, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi arsip. Analisis dilakukan secara tematik melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis konseptual dengan triangulasi sumber, metode, dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Payungi dibangun melalui integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang membentuk modal sosial komunitas. Modal sosial yang berkembang dalam bentuk bonding (ikatan internal), bridging (jembatan antarkelompok), dan linking (hubungan vertikal) ditransformasikan melalui trust (kepercayaan), collective efficacy (efikasi kolektif), dan collaborative learning (pembelajaran kolaboratif) menjadi kapasitas inovasi kolektif. Kapasitas ini memungkinkan komunitas menghasilkan inovasi sosial secara berkelanjutan dan mewujudkan keberlanjutan multidimensi yang mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan.

Penelitian ini menghasilkan Model VESI–Pancadaya yang menjelaskan keberlanjutan komunitas sebagai hasil interaksi tiga lapisan. Lapisan pertama menunjukkan bahwa integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk modal sosial yang berkembang menjadi kepercayaan, efikasi kolektif, pembelajaran kolaboratif, dan kapasitas inovasi kolektif yang menghasilkan keberlanjutan multidimensi. Lapisan kedua menjelaskan lintasan perkembangan komunitas melalui konsep Pancadaya, yaitu Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan. Lapisan ketiga terdiri atas tujuh prinsip PKIM-SIS yang mengarahkan seluruh proses. Ketiga lapisan tersebut dipengaruhi oleh faktor institusional, relasional, dan kultural, serta bermuara pada terwujudnya komunitas yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, keberlanjutan multidimensi, VESI–Pancadaya, komunitas Payungi.

ABSTRACT

SOCIAL INNOVATION IN COMMUNITY-BASED COMMUNITY EMPOWERMENT A STUDY AT PAYUNGI METRO LAMPUNG

by

Mulyadi

This study aims to develop the Value-Embedded Social Innovation–Pancadaya (VESI–Pancadaya) Model as a conceptual framework for social innovation-based community empowerment. The model explains the transformation mechanism through which value integration leads to multidimensional community sustainability within a sub-/peri-urban context. The study was conducted in the Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Community in Metro City, Lampung, Indonesia, a community that has successfully sustained its social innovation initiatives for more than seven years.

This research employed a qualitative approach using a case study strategy. Data were collected through in-depth interviews with twelve key informants, participant observation, document analysis, and archival studies. Data analysis was conducted thematically through processes of data reduction, categorization, interpretation, and conceptual synthesis, supported by source, method, and theory triangulation.

The findings reveal that Payungi’s sustainability is rooted in the integration of spiritual, social, and economic values, which collectively shape the community’s social capital. Social capital, manifested through bonding, bridging, and linking relationships, is transformed through trust, collective efficacy, and collaborative learning into collective innovation capacity. This capacity enables the community to continuously generate social innovations and achieve multidimensional sustainability encompassing spiritual, social, economic, cultural, institutional, and environmental dimensions.

The study proposes the VESI–Pancadaya Model, which conceptualizes community sustainability as the outcome of interactions among three interconnected layers. The first layer describes the social transformation mechanism, in which the integration of spiritual, social, and economic values fosters social capital that evolves into trust, collective efficacy, collaborative learning, and collective innovation capacity, ultimately leading to multidimensional sustainability. The second layer explains the community development trajectory through the Pancadaya framework, consisting of Knowledge, Mobilization, Sacrifice, Culture, and Well-being. The third layer comprises seven PKIM-SIS design principles that guide the entire process. These three layers operate within institutional, relational, and cultural contextual factors and collectively contribute to the emergence of empowered, self-reliant, and sustainable communities.

Keywords: social innovation, community empowerment, social capital, multidimensional sustainability, VESI–Pancadaya, Payungi Community.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : **INOVASI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS STUDY PADA "KOMUNITAS PAYUNGI" METRO LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Mulyadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2036011009**

Program Studi : **Doktor Studi Pembangunan**

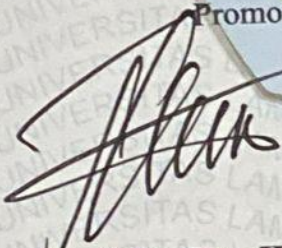
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. **Komisi Pembimbing**


Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M.Si.
NIP. 19601208 198902 1 001


Dr. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
NIP. 19631216 198902 2 001

2. **Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan**


Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N, MA, Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

MENGESAHKAN

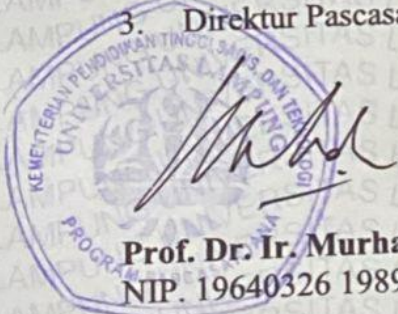
1. Tim Penguji

- Ketua : Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
(Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung).
- Sekretaris : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.
- Penguji Eksternal : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.
(Universitas Muhammadiyah Metro)
- Penguji Internal : 1. Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
(Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan).
2. Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.
3. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
5. Dr. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
selaku Co-Promotor.
6. Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M.Si.
selaku Promotor.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi: **15 Juni 2026**

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Mulyadi
Tempat dan Tanggal Lahir : Pulau Beringin, 26 Maret 1974
Program Studi : Doktor Studi Pembangunan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor Pokok Mahasiswa : 2036011009

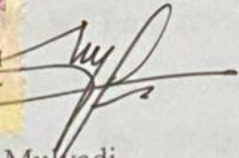
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Lampung atau diperguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi, dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan, atau gasasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya penelitian ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,




Mulyadi
NPM 2036011009

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Maret 1974, sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan Ayah Marzuki dan ibu Husmi. Dalam kehidupan keluarga, penulis dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dari istri pertama bernama Fatimah yang telah kembali kepada-Nya. Sekarang penulis menikah untuk yang kedua kali dengan Zahara dan mempunyai satu orang anak sambung, mereka sumber inspirasi, motivasi, dan semangat dalam menempuh perjalanan kehidupan maupun pengembangan karier akademik.

Pendidikan formal penulis diawali pada jenjang Sekolah Dasar di kampung halaman, kemudian dilanjutkan ke Tsanawiyah dan Aliyah hingga selesai dengan baik. Ketertarikan terhadap bidang dakwah dan pemberdayaan masyarakat mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Strata Satu (S-1) dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Dakwah. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Program Strata Dua (S-2) dan berhasil meraih gelar Magister Sosial Islam (M.Sos.I.) pada bidang keilmuan yang sama, yaitu Dakwah/Pengembangan Masyarakat Islam.

Karier akademik penulis berkembang seiring dengan pengabdian yang dijalankan sebagai dosen pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) IAIN Raden Intan Bandar Lampung, yang kini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Sebagai tenaga pendidik, penulis memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 2026037401 dan NIP 197403261999031002. Penulis saat ini menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/a).

Dalam menjalankan tugas tridarma perguruan tinggi, penulis aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang dakwah, pengembangan masyarakat Islam, serta manajemen kelembagaan dakwah. Mata kuliah yang diampu meliputi Ulumul Qur'an, Hadits Dakwah, Praktikum Dakwah, dan Manajemen Pengembangan Lembaga Dakwah. Selain aktivitas pengajaran, penulis juga aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah yang berfokus pada isu-isu pemberdayaan masyarakat, pengembangan organisasi sosial-keagamaan, inovasi sosial, serta pembangunan berbasis komunitas.

Komitmen penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan utama dalam menempuh pendidikan doctoral, sebagai upaya berkelanjutan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan masyarakat, khususnya dalam perspektif dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

MOTTO

“ Ilmu tanpa dakwah adalah pelita yang tak dinyalakan; dakwah tanpa ilmu adalah jalan tanpa peta. Hanya dengan keduanya, kita berjalan menuju cahaya yang sesungguhnya.”

Mulyadi

PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya ini untuk:

*Ayah dan Ibu Tercinta,
Yang telah memberikan doa, cinta dan kasih sayang, dukungan,
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah.*

Istriku

Terimakasih telah memberi semangat,

Anak-anakku yang menjadi sumber semangat

*Keluarga besar dan sahabat,
yang selalu memberikan doa serta dukungannya.*

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, serta doa

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUN

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Inovasi Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunikasi Studi Pada Payungi Metro Lampung”**. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Studi Pembangunan (Dr) di Universitas Lampung.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 1 Rektor Universitas Lampung Prof.Dr.Ir.Lusmeilia Afriani,D.E.A.I.P.M. atas kesempatan dan fasilitas lingkungan akademik yang kondusif.
- 2 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Prof.Dr. Anna Gustina Zainal.S.Sos., M.Si,
- 3 Ketua Program Doktor Studi Pembangunan Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D beserta seluruh karyawan yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan kelancaran dan kemudahan selama menempuh studi.
- 4 Bapak Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M.Si. selaku Promotor dan Ibu Dr. Dra, Handi Mulyaningsih, M,Si. selaku Ko-Promotor yang penuh kesabaran terus-menerus memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
- 5 Bapak Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S selaku penguji eksternal, yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan saran konstruktif bagi peningkatan kualitas karya ilmiah ini.

- 6 Prof. Dr. Syarief Makhya, m.Si. , Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. , Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku penguji internal yang telah banyak memberikan masukan yang memperkaya perpektif penulisan disertasi ini.
- 7 Para pengajar dan jajaran Sekretariat Program Doktorat Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak memberikan masukan, membantu, memfasilitasi penulis selama mengikuti pendidikan di Program Doktorat Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- 8 Informan dari Komunitas Payungi Kota Metro yaitu mas Darma Setiawan, H. Ahmad Tsauban, Mas Dwi Nugroho, Mas Iqbal, Mas Mustika, Mas Wahid, dan yang lain-lain, pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Disporapar, serta semuanya yang tidak disebutkan satu persatu.
- 9 Rekan-rekan Angkatan Tahun 2020 dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Doktorat Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam suasana kekeluargaan serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dan kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan disertasi ini, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran aga karya ilmiah ini selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhanaahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan bagi kita semua dan semoga disertasi ini bermanfaat, Aamiin.

Bandar Lampung, 6 Juni 2026
Penulis

Mulyadi
NPM. 2056041020

DAFTAR ISI

SANWACANA	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS	 12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Inovasi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat	17
2.3 Keberlanjutan Multidimensi Komunitas	27
2.4 Modal Sosial dan Kapasitas Inovasi Kolektif	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	56
2.6 Research Gap, State of the Art, dan Posisi Penelitian.....	61
2.7 Kerangka Konseptual <i>Value-Embedded Social Innovation (VESI)</i>	64
2.8 Kerangka Berpikir Penelitian	70
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	71
3.2 Lokasi dan Konteks Penelitian	71
3.3 Informan Penelitian	72
3.4 Teknik Pengumpulan Data	72
3.5 Teknik Analisis Data	73
3.6 Triangulasi sebagai Metode Keabsahan Data	74
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	76
4.1.1 Profil Payungi	77
4.1.2 Integrasi Nilai Spiritual, Sosial, dan Ekonomi sebagai Fondasi Komunitas.....	81
4.1.3 Faktor Kontekstual yang Mendukung Keberlanjutan Komunitas.....	89

4.1.4 Pembentukan Modal Sosial: Dari Integrasi Nilai Menuju Kapasitas Kolektif.....	89
4.1.5 Transformasi Modal Sosial Menjadi Kapasitas Inovasi Kolektif	101
4.1.6 Keberlanjutan Multidimensi Komunitas	106
4.1.7 Rekonstruksi Model <i>Value-Embedded Social Innovation</i> (VESI)–Pancadaya	114
4.1.8 Prinsip-Prinsip Transferable Model Payungi dan Arsitektur Konseptual Pancadaya	122
4.2 Pembahasan.....	131
4.2.1 Integrasi Nilai sebagai Antecedent Pembentukan Modal Sosial.....	131
4.2.2 Modal Sosial sebagai Mekanisme Produksi Kapasitas Inovasi Kolektif.....	134
4.2.3 Kapasitas Inovasi Kolektif sebagai Mekanisme Keberlanjutan Multidimensi.....	139
4.2.4 Faktor Kontekstual sebagai <i>Enabling Environment</i> dalam Transformasi Nilai, Modal Sosial, dan Inovasi Kolektif.....	143
4.2.5 Integrasi Prinsip Transferable dan Pancadaya dalam Pengembangan Model VESI–Pancadaya.....	148
4.2.6 Sintesis Model VESI–Pancadaya dan Kontribusi Teoretis Penelitian .	153

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan	153
5.2 Implikasi Penelitian.....	165
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	167
5.4 Rekomendasi	167

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Manifestasi Nilai Spiritual dalam Komunitas Payungi.....	83
Tabel 4.2: Manifestasi Nilai Sosial dalam Komunitas Payungi.....	85
Tabel 4.3: Manifestasi Nilai Ekonomi dalam Komunitas Payungi.....	86
Tabel 4.4: Sintesis Integrasi Nilai dalam Komunitas Payungi.....	88
Tabel 4.5: Faktor Institusional yang Mendukung Keberlanjutan Payungi.....	91
Tabel 4.6: Faktor Relasional dalam Komunitas Payungi.....	92
Tabel 4.7: Faktor Kultural yang Mendukung Keberlanjutan Payungi.....	93
Tabel 4.8: Sintesis Faktor Kontekstual dalam Komunitas Payungi.....	94
Tabel 4.9: Manifestasi Bonding Social Capital di Payungi.....	97
Tabel 4.10: Manifestasi Bridging Social Capital di Payungi.....	98
Tabel 4.11: Manifestasi Linking Social Capital di Payungi.....	99
Tabel 4.12: Sintesis Dimensi Modal Sosial dalam Komunitas Payungi.....	100
Tabel 4.13: Peran Trust dalam Transformasi Modal Sosial.....	102
Tabel 4.14: Manifestasi Collective Efficacy dalam Komunitas Payungi.....	103
Tabel 4.15 : Manifestasi <i>Collaborative Learning</i> di Payungi.....	105
Tabel 4.16 : Mekanisme Transformasi Modal Sosial Menjadi Kapasitas Inovasi Kolektif.....	106
Tabel 4.17 : Indikator Keberlanjutan Spiritual.....	108
Tabel 4.18 : Indikator Keberlanjutan Sosial.....	109
Tabel 4.19 : Indikator Keberlanjutan Ekonomi.....	110
Tabel 4.20 : Indikator Keberlanjutan Kultural.....	110
Tabel 4.21 : Indikator Keberlanjutan Kelembagaan.....	111
Tabel 4.22 : Indikator Keberlanjutan Lingkungan.....	112
Tabel 4.23 : Sintesis Keberlanjutan Multidimensi Komunitas Payungi.....	112
Tabel 4.24 : Sintesis Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas.....	115
Tabel 4.25 : Komponen Model Pancadaya.....	117
Tabel 4.26 : Kerangka Model PKIM-SIS dan Hubungan Antarprinsip.....	125
Tabel 4.27 : Analisis Komparatif: Payungi vs. Inisiatif yang Gagal.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian	70
Gambar 2 : Integrasi Nilai Spiritual, sosial dan ekonomi membentuk CVO.....	89
Gambar 3 : Integrasi nilai berkembang optimal dalam ekosistem yang kondusif.	95
Gambar 4 : Kapasitas inovasi kolektif merupakan hasil kumulatif seluruh proses transformasi.....	113
Gambar 5 : Pancadaya sebagai lintasan perkembangan komunitas.	130
Gambar 6 : Integrasi nilai memperkuat orientasi kolektif komunitas.....	134
Gambar 7 : Mekanisme mengubah modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif	138
Gambar 8 : Kapasitas inovasi kolektif, memperkuat keberlanjutan multidimensi.....	142
Gambar 9 : Faktor institusional, relasional, dan kultural sebagai enabling environment.....	147
Gambar 10 : Diagram Alir Model VESI-PANCADAYA.....	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertanyaan tentang mengapa sebagian besar inisiatif pemberdayaan masyarakat berakhir bersamaan dengan berakhirnya pendanaan eksternal, sementara sebagian kecil justru tumbuh mandiri dan mengembangkan daya tahan institusional yang melampaui ketergantungan tersebut, merupakan salah satu puzzle yang belum terpecahkan secara memuaskan dalam literatur inovasi sosial kontemporer (Cajaiba-Santana, 2014; Tracey & Stott, 2017). Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen inisiatif berbasis komunitas di negara berkembang mengalami stagnasi atau regresi dalam rentang tiga hingga lima tahun pertama sejak inisiasinya, terutama ketika struktur pendanaan awal tidak dapat dipertahankan (Dees et al., 2004; Moulaert et al., 2013).

Kondisi ini menciptakan paradoks inovasi sosial yang diakui secara luas sebagai instrumen transformasi struktural (Westley et al., 2014). Namun, kapasitas aktualnya untuk bertahan dan berkembang secara otonom di lingkungan semi-urban masih sangat kurang dipahami dan hampir absen dalam literatur berbasis konteks Indonesia. Dalam lanskap inilah Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) di Kota Metro, Lampung, muncul sebagai fenomena yang secara akademis patut diperhatikan. Sejak beroperasi pada tahun 2017, Payungi tidak hanya bertahan melewati fase kritis yang menggugurkan mayoritas inisiatif sejenis, tetapi terus mengembangkan kapasitasnya baik secara ekonomi, sosial, maupun institusional tanpa bergantung pada intervensi pemerintah atau donor eksternal secara permanen (Dokumentasi Payungi, 2023).

Inisiatif ini berkembang di tengah konteks yang secara struktural tidak kondusif dalam sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 170.000 jiwa (BPS Kota Metro, 2023) dengan basis ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan perdagangan informal,

tanpa ekosistem inovasi yang matang. Namun, Payungi berhasil membangun ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas yang inklusif dan, yang lebih penting, self-sustaining. Keberhasilan ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh teori difusi inovasi konvensional (Rogers, 2003) maupun model social enterprise yang berorientasi pasar (Dees, 1998), sehingga mendorong kebutuhan akan kerangka analitis alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik kontekstual inovasi di Negara berkembang (Gupta et al., 2012; Pansera & Owen, 2018).

Secara teoritis, inovasi sosial telah didefinisikan sebagai pengembangan ide, layanan, atau model baru yang memenuhi kebutuhan sosial secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang ada (Phills et al., 2008; Murray et al., 2010). Badan literatur yang berkembang pesat sejak dekade 2000-an ini secara dominan berpijak pada pengalaman negara-negara dengan industri maju di Amerika Utara dan Eropa Barat (Moulaert et al., 2013; Nicholls et al., 2015), dengan asumsi bahwa terdapat kapasitas infrastruktur, regulasi, dan modal sosial yang relatif mapan sebagai prasyarat keberhasilan. Akibatnya, literatur tersebut menghadapi keterbatasan aplikabilitas yang signifikan ketika dihadapkan pada konteks semi-urban di Asia Tenggara, di mana relasi sosial komunal, kearifan lokal, dan ekonomi informal berperan sebagai mekanisme substitusi atas ketiadaan infrastruktur formal (Hulgård & Ferreira, 2019; Pel et al., 2020).

Penelitian ini berargumen bahwa gap ini bukan sekadar persoalan geografis, melainkan representasi dari kegagalan konseptual yang lebih mendasar dalam mengartikulasikan kondisi-kondisi pemberdayaan yang valid lintas konteks. Di tingkat nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen kelembagaan yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui instrumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar pelaksanaan Program Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. dan berbagai regulasi turunannya yang mendorong desentralisasi pembangunan hingga level terbawah (Antlöv et al., 2016; Syukri et al., 2018).

Namun, evaluasi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar program tersebut masih beroperasi dalam paradigma top-down, di mana pemerintah mendefinisikan

agenda, menetapkan indikator keberhasilan, dan mengalokasikan sumber daya, sementara komunitas berposisi sebagai penerima manfaat pasif alih alih sebagai agen transformasi otonom (Dasgupta & Beard, 2007; Sabogal & Li, 2009). Penelitian tentang inisiatif yang organik, berbasis inisiatif warga, dan mampu mencapai keberlanjutan jangka panjang tanpa ketergantungan struktural pada program pemerintah masih sangat langka, khususnya dalam konteks kota-kota menengah dan kecil di luar Pulau Jawa.

Lampung, sebagai salah satu provinsi dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks akibat warisan transmigrasi, heterogenitas etnis, dan ketimpangan antarwilayah (BPS Provinsi Lampung, 2023; Tirtosudarmo, 2009), menawarkan laboratorium yang kaya namun hampir tidak terjamah dalam literatur inovasi sosial berbasis komunitas. Kota Metro menghadirkan karakter semi-urban yang secara analitis berbeda dari kota-kota besar yang menjadi fokus dominan kajian pembangunan perkotaan. Cukup urban untuk memiliki akses informasi, jaringan sosial lintas-etnis, dan kehadiran lembaga pendidikan tinggi, namun cukup rural untuk mempertahankan kohesi komunitas, nilai-nilai gotong royong, dan ketergantungan pada modal sosial informal sebagai mekanisme koordinasi (Satterthwaite & Tacoli, 2003; Tacoli, 2003).

Kondisi ini menciptakan ekologi institusional yang unik di mana inovasi sosial dapat berkembang melalui jalur yang berbeda secara fundamental dari jalur inovasi di metropolitan maupun pedesaan murni. Ketika inisiatif seperti Payungi tumbuh dan bertahan dalam ekologi semacam ini, pertanyaan analitis yang muncul bukan hanya "apa yang mereka lakukan", melainkan "mekanisme apa yang memungkinkan keberlanjutan tersebut" dan "kondisi kontekstual apa yang memediasi efektivitas mekanisme tersebut". Pertanyaan-pertanyaan ini, yang berada di jantung penelitian ini, belum mendapat jawaban yang memadai dalam literatur yang ada.

Relevansi pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin mendesak dalam konteks Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, di mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan menghapus kemiskinan, menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan

lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan mensyaratkan pendekatan yang melampaui transfer sumber daya dan menuntut transformasi kapasitas agensi pada level komunitas (United Nations, 2015; Sachs et al., 2019). Dokumen kebijakan SDGs secara eksplisit mengakui bahwa pencapaian target-target tersebut tidak mungkin dicapai tanpa model-model inovasi lokal yang dapat berfungsi sebagai proof of concept bagi pendekatan berbasis komunitas yang berkelanjutan (Kanie & Biermann, 2017).

Payungi, dengan rekam jejaknya selama lebih dari tujuh tahun, menyediakan bukti empiris langka tentang bagaimana komunitas di kota kecil Indonesia dapat mengoperasionalkan prinsip-prinsip SDGs bukan sebagai tujuan eksternal yang diimposisikan, melainkan sebagai ekspresi organik dari nilai-nilai dan kebutuhan internal komunitas itu sendiri. Namun, tanpa analisis sistematis yang mendokumentasikan dan menjelaskan fenomena ini, potensinya sebagai model referensial bagi komunitas lain maupun bagi perumusan kebijakan tetap tidak teraktualisasi.

Secara teoritis, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tiga celah (gaps) yang bersifat kumulatif dalam literatur yang ada. Pertama, tidak ada kerangka teori yang memadai untuk menjelaskan keberlanjutan inovasi sosial berbasis komunitas di konteks semi-urban Negara berkembang yang mengintegrasikan secara simultan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Teori yang ada cenderung bersifat parsial atau dikembangkan untuk konteks yang berbeda secara fundamental (Hulgård & Ferreira, 2019; Pel et al., 2020; Voorberg et al., 2015).

Kedua, konsep keberlanjutan dalam inovasi sosial (*social innovation sustainability*) belum cukup dikonseptualisasikan sebagai fenomena yang berdimensi majemuk. Literatur dominan cenderung mereduksinya pada keberlanjutan finansial semata, mengabaikan keberlanjutan sosial (reproduksi modal sosial), keberlanjutan institusional (keberlangsungan struktur tata kelola), dan keberlanjutan kultural (transmisi nilai dan identitas) sebagai dimensi yang sama-sama konstitutif (Dees et al., 2004; Nicholls et al., 2015; Smith et al., 2016).

Ketiga, mekanisme spesifik melalui mana modal sosial informal dalam masyarakat multietnis seperti yang ada di Kota Metro dengan komposisi etnis Jawa, Lampung, Batak, Sunda, dan Minang yang signifikan (BPS Kota Metro, 2023) dapat dikonversi menjadi kapasitas inovasi kolektif yang berkelanjutan belum dipahami secara mendalam dalam kerangka teori inovasi sosial yang ada (Woolcock & Narayan, 2000; Putnam, 2000; Bourdieu, 1986).

Keempat, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk modal sosial, yang kemudian ditransformasikan melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning menjadi kapasitas inovasi kolektif yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan multidimensi dalam suatu model konseptual yang terpadu.

Kelima, Belum terdapat model inovasi sosial yang menjelaskan secara sistematis lintasan perkembangan komunitas yang dimulai dari pembentukan pengetahuan kolektif, berkembang menjadi pergerakan sosial, diperkuat oleh pengorbanan dan komitmen bersama, terinstitusionalisasi dalam kebudayaan komunitas, serta bermuara pada tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Keenam, belum ada *transferable design principles* yang menjelaskan replikasi keberhasilan komunitas inovatif pada konteks semi-urban Indonesia.

Dari perspektif empiris, kelangkaan studi yang mendokumentasikan secara longitudinal dan holistik inisiatif inovasi sosial berbasis komunitas di Indonesia mengakibatkan absennya basis pengetahuan yang dibutuhkan untuk transfer kebijakan yang informatif. Kajian-kajian yang ada umumnya bersifat deskriptif, fokus pada snapshot tunggal, dan tidak menggunakan kerangka analitis yang memungkinkan identifikasi mekanisme kausal antara karakteristik institusional komunitas dan kapasitas keberlanjutannya (Beard, 2010; Antlöv et al., 2016).

Lebih spesifik lagi, masih sedikit penelitian sebelumnya yang secara sistematis menganalisis fenomena Payungi sebagai objek kajian ilmiah, meskipun inisiatif ini

telah menarik perhatian media nasional dan menjadi referensi informal bagi beberapa komunitas di Sumatera yang berupaya menginisiasi pasar serupa.

Absennya dokumentasi akademis yang terstruktur berarti bahwa pengetahuan tentang faktor-faktor yang menjelaskan keberhasilan Payungi masih tersimpan dalam bentuk *tacit knowledge* yang tidak dapat didifusikan secara efisien dan tidak dapat diuji secara kritis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah-celah tersebut secara bersamaan melalui analisis mendalam dan sistematis terhadap fenomena Payungi.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual integratif yang dirumuskan sebagai Model *Value-Embedded Social Innovation* (VESI)–Pancadaya. Model ini dibangun berdasarkan temuan empiris mengenai bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk modal sosial komunitas yang kemudian ditransformasikan melalui *trust*, *collective efficacy*, dan *collaborative learning* menjadi kapasitas inovasi kolektif yang menghasilkan keberlanjutan multidimensi.

Berbeda dengan model inovasi sosial yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan, jaringan, atau kewirausahaan sosial, Model VESI–Pancadaya menempatkan nilai sebagai fondasi utama proses inovasi sosial. Model ini juga menjelaskan lintasan perkembangan komunitas melalui konsep Pancadaya yang terdiri atas Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan, serta mengidentifikasi tujuh prinsip transferable (PKIM-SIS) yang memungkinkan model tersebut direplikasi pada berbagai konteks komunitas semi-urban di Indonesia dan Global South.

Kerangka ini dibangun dari sintesis kritis antara teori pemberdayaan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008; Freire, 1970), teori inovasi sosial (Mulgan et al., 2007; Murray et al., 2010; Cajaiba-Santana, 2014), teori modal sosial (Putnam, 2000; Bourdieu, 1986; Woolcock & Narayan, 2000), dan perspektif inovasi akar rumput yang relevan untuk konteks Negara berkembang (Gupta et al., 2012; Pansera & Owen, 2018).

Secara empiris, penelitian ini menyediakan dokumentasi longitudinal yang komprehensif tentang Payungi, yang dapat berfungsi sebagai referensi akademis maupun kebijakan untuk komunitas dan pembuat kebijakan yang tertarik pada model pemberdayaan berbasis inovasi sosial. Signifikansi penelitian ini melampaui kontribusinya terhadap pemahaman tentang Payungi sebagai kasus spesifik. Dengan mendokumentasikan dan menganalisis secara sistematis fenomena keberlanjutan yang anomalous ini, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat (*community development science*) dengan memberikan evidensi empiris tentang kondisi-kondisi aktual yang memungkinkan transformasi sosial yang genuine, bukan transformasi yang bergantung pada transfer sumber daya eksternal yang secara inheren tidak berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah, temuan penelitian ini membantu menyediakan dasar evidensial guna merancang intervensi yang lebih efisien dalam membantu inisiatif komunitas tanpa menciptakan ketergantungan. Bagi akademisi, penelitian ini membuka agenda penelitian baru tentang inovasi sosial di setting semi-urban Asia Tenggara yang selama ini terabaikan. Dan bagi komunitas-komunitas di Indonesia yang tengah berjuang membangun kemandirian ekonomi dan sosial, Payungi menawarkan bukti konkret bahwa perubahan yang bermakna dan berkelanjutan dapat dimulai dari dalam, dari sumber daya yang tersedia, dan dari nilai-nilai yang sudah ada sebuah bukti yang, dalam konteks pembangunan Indonesia pasca-desentralisasi, memiliki resonansi yang jauh melampaui batas administratif Kota Metro.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Umum

Bagaimana mekanisme transformasi sosial yang menjelaskan hubungan antara integrasi nilai, modal sosial, kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi pada komunitas Payungi, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat direkonstruksi menjadi Model VESI–Pancadaya yang relevan bagi konteks komunitas semi-urban di Indonesia dan Global South?

1.2.3 Rumusan Khusus

Permasalahan umum tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan turunan atau rumusan khusus yakni:

1. Bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk orientasi kolektif dalam komunitas Payungi?
2. Bagaimana faktor institusional, relasional, dan kultural mempengaruhi proses keberlanjutan komunitas Payungi?
3. Bagaimana modal sosial dalam bentuk bonding, bridging, dan linking social capital berkembang dalam komunitas Payungi?
4. Bagaimana trust, collective efficacy, dan collaborative learning mentransformasikan modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif?
5. Bagaimana kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan multidimensi pada komunitas Payungi?
6. Bagaimana pengalaman Payungi dapat direkonstruksi menjadi Model VESI–Pancadaya beserta prinsip-prinsip transferable yang relevan untuk konteks komunitas semi-urban?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan **Model Value-Embedded Social Innovation–Pancadaya (VESI–Pancadaya)** sebagai kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi sosial yang menjelaskan mekanisme transformasi dari integrasi nilai menuju keberlanjutan multidimensi komunitas pada konteks semi-urban.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk orientasi kolektif dalam komunitas Payungi.
2. Menganalisis pengaruh faktor institusional, relasional, dan kultural terhadap proses keberlanjutan komunitas Payungi.
3. Menganalisis perkembangan modal sosial dalam bentuk bonding social capital, bridging social capital, dan linking social capital dalam komunitas Payungi.
4. Menjelaskan mekanisme transformasi modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning.
5. Menganalisis bagaimana kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan multidimensi yang mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan dalam komunitas Payungi.
6. Merekonstruksi pengalaman pemberdayaan masyarakat di Payungi menjadi Model VESI–Pancadaya beserta prinsip-prinsip transferable yang relevan untuk pengembangan komunitas semi-urban di Indonesia dan Global South.

1.3.3 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, dan modal sosial melalui beberapa aspek berikut:

1. Mengembangkan Model VESI–Pancadaya sebagai kerangka konseptual baru yang menjelaskan hubungan antara integrasi nilai, modal sosial, kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi komunitas.
2. Memperluas teori inovasi sosial dengan menempatkan integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai fondasi utama pembentukan inovasi sosial berbasis komunitas.

3. Memperkaya kajian modal sosial dengan menjelaskan mekanisme konversi bonding, bridging, dan linking social capital menjadi kapasitas inovasi kolektif melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning.
4. Menghasilkan konseptualisasi baru mengenai lintasan perkembangan komunitas melalui kerangka Pancadaya yang terdiri atas Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan.
5. Menawarkan seperangkat prinsip transferable (PKIM-SIS) yang dapat digunakan sebagai landasan konseptual dalam studi dan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada konteks semi-urban.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Memberikan dasar empiris dan konseptual dalam merancang kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas, bukan sekadar pemberian bantuan atau intervensi jangka pendek.

2. Bagi Organisasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial

Menyediakan model dan prinsip-prinsip praktis yang dapat digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan.

3. Bagi Komunitas dan Praktisi Pengembangan Masyarakat

Memberikan referensi mengenai strategi membangun komunitas yang mandiri melalui penguatan nilai, modal sosial, pembelajaran kolektif, inovasi sosial, dan tata kelola partisipatif yang sesuai dengan karakteristik lokal.

4. Bagi Perguruan Tinggi dan Peneliti

Menjadi rujukan akademik dalam pengembangan penelitian mengenai inovasi sosial, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, community development, dan keberlanjutan komunitas, khususnya pada konteks masyarakat semi-urban di Indonesia dan Global South.

5. Bagi Komunitas Sub/peri-Urban di Indonesia

Memberikan model konseptual dan panduan pengembangan yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal untuk memperkuat kemandirian, kapasitas inovasi, dan keberlanjutan komunitas secara multidimensional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial. Paradigma ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan konvensional yang cenderung bersifat top-down, dimana masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai aktor yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan sumber daya untuk menentukan arah perubahan yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka sendiri.

Pemikiran mengenai pemberdayaan banyak dipengaruhi oleh gagasan Paulo Freire (1970) tentang conscientization atau penyadaran kritis. Freire menegaskan bahwa proses pembangunan harus mampu membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketergantungan melalui peningkatan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial yang mereka hadapi. Melalui proses refleksi dan tindakan (praxis), masyarakat memperoleh kemampuan untuk memahami realitas sosial sekaligus mengubahnya secara kolektif.

Pandangan tersebut diperluas oleh Sen (1999) melalui capability approach yang menempatkan pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan substantif manusia. Menurut Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau kepemilikan sumber daya ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu dan kelompok untuk memilih, mengakses peluang, serta menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan demikian, pemberdayaan

merupakan proses peningkatan kapasitas yang memungkinkan masyarakat memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses sekaligus hasil yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan individu maupun kelompok dalam memengaruhi lingkungan sosial, mengakses sumber daya, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai program bantuan atau intervensi eksternal, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertindak secara mandiri.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi personal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri individu. Kedua, dimensi relasional yang berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan sosial, kerja sama, dan partisipasi dalam kehidupan komunitas. Ketiga, dimensi kolektif yang berkaitan dengan kemampuan komunitas mengorganisasi sumber daya dan melakukan tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai proses transformasi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitas individu dan kolektif, memperluas akses terhadap sumber daya, memperkuat posisi dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

2.1.2 Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Perkembangan konsep pemberdayaan melahirkan pendekatan yang lebih menekankan pentingnya komunitas sebagai arena utama perubahan sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai Community-Based Development atau pemberdayaan berbasis komunitas. Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi bahwa masyarakat lokal memiliki sumber daya, pengetahuan, nilai, dan pengalaman yang dapat menjadi fondasi pembangunan apabila dikelola secara partisipatif.

Pemberdayaan berbasis komunitas menempatkan komunitas sebagai unit analisis sekaligus unit intervensi. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya bantuan eksternal, tetapi oleh kemampuan komunitas mengidentifikasi masalah, memobilisasi sumber daya lokal, serta mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Kretzmann dan McKnight (1993) melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menegaskan bahwa setiap komunitas memiliki aset yang dapat menjadi modal pembangunan. Aset tersebut tidak hanya berupa sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup keterampilan warga, jaringan sosial, organisasi lokal, tradisi budaya, kepemimpinan komunitas, serta berbagai bentuk pengetahuan lokal yang berkembang dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) yang berfokus pada berbagai kekurangan masyarakat, pendekatan berbasis aset memulai pembangunan dengan mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki komunitas. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat partisipasi, serta menciptakan keberlanjutan program pembangunan.

Dalam perspektif pemberdayaan berbasis komunitas, partisipasi masyarakat bukan sekadar keterlibatan dalam pelaksanaan program, tetapi mencakup seluruh tahapan pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Partisipasi yang bermakna memungkinkan masyarakat membangun kapasitas kolektif serta menghasilkan berbagai bentuk perubahan sosial yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, pemberdayaan berbasis komunitas juga memberikan ruang bagi berkembangnya pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa solusi yang lahir dari komunitas sering kali lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan program yang dirancang secara eksternal. Oleh karena itu, komunitas tidak hanya berfungsi sebagai penerima pembangunan, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan dan agen perubahan sosial.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Global South

Meskipun konsep pemberdayaan berkembang luas dalam literatur pembangunan, sebagian besar teori yang dominan lahir dari pengalaman negara-negara Global North. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa banyak teori pembangunan kurang sensitif terhadap realitas sosial, budaya, dan historis masyarakat di negara berkembang.

Escobar (1995) mengkritik paradigma pembangunan modern yang memandang masyarakat Global South sebagai kelompok yang tertinggal dan harus mengikuti jalur perkembangan negara-negara Barat. Menurutnya, paradigma tersebut sering mengabaikan pengetahuan lokal, nilai budaya, dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka sendiri.

Perspektif Global South menempatkan komunitas sebagai sumber pengetahuan dan inovasi yang penting. Pengetahuan lokal tidak dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai sumber daya strategis yang dapat menghasilkan berbagai bentuk solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pembangunan dipahami sebagai proses yang berakar pada pengalaman masyarakat, bukan sekadar transfer model pembangunan dari luar.

Dalam konteks Indonesia, perspektif ini sangat relevan karena berbagai praktik pemberdayaan masyarakat tumbuh dari kombinasi nilai budaya lokal, tradisi gotong royong, solidaritas sosial, serta berbagai bentuk kelembagaan komunitas yang berkembang secara organik. Berbagai komunitas berhasil menunjukkan bahwa pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal mampu menghasilkan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada intervensi eksternal.

Oleh karena itu, perspektif Global South memberikan landasan penting bagi penelitian ini untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas komunitas, serta pengembangan inovasi yang berakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat.

2.1.4 Faktor Kontekstual dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral. Proses tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk peluang, batasan, sumber daya, dan pola interaksi yang berkembang dalam komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konteks menjadi penting untuk menjelaskan mengapa suatu komunitas berhasil berkembang sementara komunitas lain menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teoritik untuk menjelaskan faktor kontekstual yang memengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, yaitu Institutional Theory, Embeddedness Theory, dan Ecological Systems Theory.

Institutional Theory yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa organisasi dan komunitas beroperasi dalam lingkungan kelembagaan yang terdiri atas aturan, norma, dan nilai yang memengaruhi perilaku para aktor. Dukungan kebijakan, legitimasi sosial, akses terhadap sumber daya, serta kemitraan dengan berbagai lembaga formal merupakan bagian dari konteks institusional yang memengaruhi keberhasilan komunitas.

Embeddedness Theory dari Granovetter (1985) menegaskan bahwa tindakan sosial dan ekonomi selalu tertanam dalam jaringan hubungan sosial. Oleh karena itu, kualitas hubungan antaraktor, tingkat kepercayaan, pola kolaborasi, dan kepemimpinan komunitas menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan proses pemberdayaan.

Sementara itu, Ecological Systems Theory yang dikembangkan Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perilaku individu dan kelompok dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi. Dalam konteks komunitas, nilai budaya, tradisi lokal, identitas kolektif, dan norma sosial menjadi faktor yang memengaruhi cara masyarakat memaknai perubahan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan institusional, relasional, dan kultural yang melingkupinya.

2.1.5 Sintesis Faktor Kontekstual

Berdasarkan integrasi Institutional Theory, Embeddedness Theory, dan Ecological Systems Theory, penelitian ini mengonstruksi faktor kontekstual sebagai ekosistem yang membentuk proses pemberdayaan masyarakat. Faktor kontekstual tersebut terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu dimensi institusional, dimensi relasional, dan dimensi kultural.

Dimensi institusional mencakup dukungan kebijakan, legitimasi sosial, kemitraan, dan akses terhadap sumber daya. Dimensi relasional mencakup kualitas hubungan sosial, kepercayaan, kepemimpinan, dan kolaborasi antaraktor. Adapun dimensi kultural mencakup nilai budaya, identitas komunitas, norma sosial, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga dimensi tersebut tidak diposisikan sebagai faktor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai enabling ecosystem yang memengaruhi efektivitas proses pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, faktor kontekstual menjadi kondisi yang memungkinkan berkembangnya berbagai proses sosial yang selanjutnya berkontribusi terhadap pembentukan modal sosial, pengembangan kapasitas inovasi kolektif, dan pencapaian keberlanjutan multidimensi komunitas.

2.2 Inovasi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Konsep Inovasi Sosial

Perubahan sosial yang semakin kompleks menuntut lahirnya berbagai solusi yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar maupun intervensi pemerintah semata. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, serta melemahnya kohesi sosial memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan sumber daya lokal

secara kreatif. Dalam konteks inilah konsep inovasi sosial (*social innovation*) berkembang sebagai salah satu paradigma penting dalam studi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi sosial.

Istilah inovasi sosial mulai memperoleh perhatian luas sejak dekade 1990-an ketika para akademisi dan praktisi pembangunan menyadari bahwa banyak persoalan sosial tidak dapat diselesaikan hanya melalui inovasi teknologi atau pertumbuhan ekonomi. Berbagai keberhasilan komunitas lokal dalam menciptakan solusi berbasis masyarakat menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali lahir dari inovasi dalam pola hubungan sosial, mekanisme kolaborasi, dan tata kelola komunitas. Oleh karena itu, fokus inovasi sosial tidak terletak pada penciptaan teknologi baru semata, melainkan pada kemampuan menghasilkan cara-cara baru dalam mengorganisasi kehidupan sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, inovasi sosial berbeda dengan inovasi teknologi maupun inovasi bisnis. Inovasi teknologi berorientasi pada penciptaan produk, proses, atau sistem teknis yang lebih efisien. Inovasi bisnis berfokus pada penciptaan nilai ekonomi dan keunggulan kompetitif. Sebaliknya, inovasi sosial berorientasi pada penciptaan nilai sosial (*social value*) melalui perubahan pola interaksi, hubungan sosial, kelembagaan, maupun tata kelola yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan inovasi sosial tidak hanya ditentukan oleh tingkat kebaruan (*novelty*), tetapi juga oleh sejauh mana inovasi tersebut mampu memperbaiki kondisi sosial, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Mulgan et al. (2007) mendefinisikan inovasi sosial sebagai aktivitas dan layanan baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial sekaligus menciptakan hubungan sosial yang lebih efektif dibandingkan pendekatan sebelumnya. Definisi ini menunjukkan bahwa inovasi sosial memiliki dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu menghasilkan solusi atas masalah sosial dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif.

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Phills, Deiglmeier, dan Miller (2008) yang mendefinisikan inovasi sosial sebagai solusi baru terhadap suatu masalah

sosial yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, atau adil dibandingkan solusi yang telah ada sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa nilai utama yang dihasilkan dari inovasi sosial ditujukan untuk masyarakat secara luas, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau organisasi tertentu. Dengan demikian, dimensi kebermanfaatn publik menjadi karakteristik utama yang membedakan inovasi sosial dari bentuk inovasi lainnya.

Perspektif yang lebih komprehensif dikembangkan oleh Moulaert et al. (2013) yang memandang inovasi sosial sebagai proses transformasi sosial yang mencakup tiga dimensi utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan sosial yang sebelumnya tidak terpenuhi (*satisfaction of human needs*). Kedua, perubahan hubungan sosial (*changes in social relations*) yang menghasilkan pola interaksi baru yang lebih inklusif dan partisipatif. Ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif (*empowerment and socio-political capability*). Dalam perspektif ini, inovasi sosial tidak hanya menghasilkan solusi terhadap masalah sosial, tetapi juga mengubah struktur sosial yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut.

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa inovasi sosial memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berorientasi pada penyelesaian masalah sosial yang nyata. Kedua, melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Ketiga, memanfaatkan sumber daya lokal secara kreatif. Keempat, menghasilkan perubahan hubungan sosial dan kelembagaan. Kelima, menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa inovasi sosial bukan sekadar program atau kegiatan baru, melainkan suatu proses perubahan sosial yang melibatkan transformasi cara berpikir, cara bekerja, dan cara masyarakat mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Dalam praktiknya, inovasi sosial umumnya berkembang melalui proses yang bersifat kolaboratif. Murray, Caulier-Grice, dan Mulgan (2010) menjelaskan bahwa inovasi sosial lahir melalui serangkaian tahapan yang meliputi identifikasi masalah sosial, pengembangan ide, eksperimen, implementasi, evaluasi, hingga penyebaran (*scaling*) dan institusionalisasi. Proses ini menunjukkan bahwa inovasi sosial merupakan fenomena yang bersifat dinamis dan berkembang melalui pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi sosial sangat bergantung pada

kemampuan komunitas untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi terhadap perubahan, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Aspek kolaborasi menjadi semakin penting karena inovasi sosial hampir selalu melibatkan berbagai aktor yang berasal dari sektor yang berbeda. Pemerintah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan kelompok masyarakat menjadi bagian dari ekosistem inovasi sosial. Dalam konteks ini, inovasi sosial tidak dipahami sebagai hasil kerja individu yang bersifat heroik, melainkan sebagai produk interaksi sosial yang melibatkan berbagai sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan yang berbeda. Semakin kuat kolaborasi yang terbangun, semakin besar peluang munculnya inovasi yang relevan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial memiliki posisi yang sangat strategis karena memungkinkan masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program. Inovasi sosial memberikan ruang bagi komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merancang solusi yang sesuai dengan konteks lokal, serta mengelola proses perubahan secara mandiri. Oleh karena itu, inovasi sosial sering dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian, ketahanan komunitas (*community resilience*), dan keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, sejumlah kritik juga muncul terhadap konsep inovasi sosial. Beberapa peneliti menilai bahwa sebagian besar studi inovasi sosial masih terlalu menekankan aspek keberhasilan program tanpa menjelaskan secara memadai mekanisme internal yang memungkinkan inovasi tersebut muncul dan berkembang. Selain itu, banyak penelitian lebih berfokus pada hasil inovasi daripada proses sosial yang mendasarinya. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana nilai, hubungan sosial, pembelajaran kolektif, dan kapasitas komunitas berinteraksi dalam menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.

Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu dasar pengembangan penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa inovasi sosial tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses integrasi nilai, pembentukan modal

sosial, pengembangan kepercayaan (*trust*), penguatan *collective efficacy*, dan pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*) yang berlangsung dalam komunitas. Dengan kata lain, inovasi sosial dipahami sebagai produk dari mekanisme sosial yang tertanam (*embedded*) dalam sistem nilai dan relasi komunitas.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini mendefinisikan inovasi sosial sebagai proses kolektif yang berakar pada integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, yang melalui modal sosial, kepercayaan, keyakinan kolektif, dan pembelajaran kolaboratif menghasilkan solusi baru terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Definisi ini menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kerangka *Value-Embedded Social Innovation* (VESI) dan perumusan model yang dikembangkan dalam penelitian ini.

2.2.2 Inovasi Sosial Berbasis Komunitas

Salah satu bentuk inovasi sosial yang memperoleh perhatian luas dalam studi pembangunan kontemporer adalah *community-based social innovation* atau inovasi sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam keseluruhan proses perubahan sosial, mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan masalah, pengembangan solusi, implementasi program, hingga evaluasi dan keberlanjutan inovasi. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down, inovasi sosial berbasis komunitas berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan (*agents of change*) yang mampu merancang dan mengelola solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi sendiri.

Landasan utama pendekatan ini adalah pengakuan terhadap pentingnya pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan pengalaman hidup masyarakat sebagai sumber inovasi. Banyak persoalan sosial memiliki karakteristik yang sangat kontekstual sehingga tidak selalu dapat diselesaikan melalui kebijakan yang bersifat seragam atau solusi yang dirancang dari luar komunitas. Masyarakat lokal sering kali memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar masalah, dinamika

sosial, nilai budaya, serta sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Oleh karena itu, solusi yang lahir dari komunitas cenderung lebih relevan, lebih mudah diterima, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan solusi yang bersifat eksternal.

Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Robert Chambers, yang menekankan bahwa masyarakat bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk menentukan arah perubahan yang mereka inginkan. Dalam perspektif ini, proses pembangunan yang efektif harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Menurut Frances Westley dan Nino Antadze (2010), inovasi sosial berbasis komunitas memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi karena memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat. Ketika anggota komunitas terlibat sejak tahap awal proses inovasi, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*), tetapi juga menjadi pemilik (*owners*) dari proses perubahan itu sendiri. Keterlibatan tersebut menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) yang memperkuat komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan inovasi.

Legitimasi sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam inovasi sosial berbasis komunitas. Berbeda dengan program yang dirancang oleh aktor eksternal, inovasi yang tumbuh dari komunitas umumnya lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat karena lahir dari kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh anggota komunitas. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam membangun partisipasi, mengurangi resistensi terhadap perubahan, serta memperkuat dukungan sosial terhadap pelaksanaan program.

Dalam perspektif teori modal sosial, keberhasilan inovasi sosial berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial yang berkembang di antara anggota masyarakat. Jaringan sosial, norma bersama, nilai-nilai kolektif, dan tingkat kepercayaan yang tinggi menciptakan kondisi yang kondusif bagi

munculnya kerja sama dan tindakan kolektif. Komunitas yang memiliki modal sosial kuat umumnya lebih mampu mengorganisasi sumber daya, memobilisasi partisipasi masyarakat, dan membangun kolaborasi untuk mengatasi berbagai persoalan bersama.

Selain bergantung pada modal sosial, inovasi sosial berbasis komunitas juga berkembang melalui proses pembelajaran kolektif (*collective learning*). Komunitas belajar dari pengalaman, melakukan refleksi terhadap praktik yang telah dijalankan, bertukar pengetahuan, serta mengembangkan solusi melalui proses coba-coba (*experimentation*). Dengan demikian, inovasi sosial tidak muncul sebagai hasil dari perencanaan yang sepenuhnya rasional dan linier, melainkan berkembang secara bertahap melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Murray, Caulier-Grice, dan Mulgan (2010) menjelaskan bahwa sebagian besar inovasi sosial berkembang melalui siklus pembelajaran yang meliputi identifikasi kebutuhan, pencarian ide, pengembangan prototipe, implementasi, evaluasi, hingga proses penyebaran (*scaling*) dan institusionalisasi. Dalam konteks komunitas, tahapan tersebut sering berlangsung secara informal melalui berbagai ruang interaksi seperti pertemuan warga, kelompok swadaya masyarakat, komunitas usaha, forum pemuda, kelompok keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya.

Karakteristik penting lainnya dari inovasi sosial berbasis komunitas adalah kemampuannya mengintegrasikan berbagai bentuk sumber daya yang tersedia di tingkat lokal. Sumber daya tersebut tidak hanya berupa modal ekonomi, tetapi juga mencakup pengetahuan lokal, nilai budaya, jejaring sosial, kepemimpinan komunitas, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong. Dalam banyak kasus, keterbatasan sumber daya material justru mendorong masyarakat untuk mengembangkan solusi yang kreatif dan adaptif berdasarkan potensi yang dimiliki.

Dalam konteks ini, inovasi sosial berbasis komunitas memiliki hubungan yang erat dengan konsep *community resilience* atau ketahanan komunitas. Komunitas yang mampu menghasilkan inovasi sosial umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis, mengatasi ketidakpastian, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial maupun ekonomi. Inovasi sosial menjadi instrumen

yang memungkinkan komunitas mengembangkan berbagai strategi baru untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi sosial berbasis komunitas dapat ditemukan dalam beragam sektor pembangunan. Pada bidang ekonomi, inovasi sosial muncul dalam bentuk usaha bersama, koperasi komunitas, pasar kreatif, dan ekonomi berbasis komunitas. Pada bidang lingkungan, inovasi berkembang melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat, konservasi sumber daya alam, dan pertanian berkelanjutan. Pada bidang sosial dan pendidikan, inovasi diwujudkan melalui pendidikan alternatif, pemberdayaan kelompok rentan, penguatan kapasitas pemuda, serta pengembangan ruang-ruang belajar komunitas. Keragaman praktik tersebut menunjukkan bahwa inovasi sosial berbasis komunitas memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal yang berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia, inovasi sosial berbasis komunitas memiliki akar yang kuat dalam tradisi sosial masyarakat. Nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, kearifan lokal, dan kehidupan komunal yang masih relatif kuat di berbagai daerah menjadi fondasi penting bagi berkembangnya berbagai bentuk inovasi sosial. Banyak komunitas berhasil menciptakan solusi kreatif terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pengorganisasian masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai lokal tersebut.

Namun demikian, keberhasilan inovasi sosial berbasis komunitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan nilai dan tradisi sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberlanjutan inovasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunitas membangun kepemimpinan yang adaptif, memperluas jejaring kemitraan, mengembangkan mekanisme pembelajaran kolektif, serta memperkuat kapasitas organisasi komunitas. Tanpa kemampuan tersebut, inovasi sering kali berhenti pada tahap proyek dan sulit berkembang menjadi perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, inovasi sosial berbasis komunitas dipahami sebagai proses perubahan sosial yang lahir dari kemampuan komunitas mengintegrasikan nilai-nilai bersama, membangun modal sosial, memperkuat kepercayaan (*trust*),

mengembangkan *collective efficacy*, dan menciptakan pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*) untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Perspektif ini menempatkan komunitas tidak hanya sebagai lokasi terjadinya inovasi, tetapi sebagai aktor utama yang secara aktif membangun kapasitas inovasi kolektif untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, spiritual, dan kelembagaan. Dengan demikian, inovasi sosial berbasis komunitas menjadi fondasi konseptual yang menghubungkan teori inovasi sosial dengan model *Value-Embedded Social Innovation (VESI)* dan pengembangan Model Pancadaya dalam penelitian ini.

2.2.3 Inovasi Sosial sebagai Mekanisme Pemberdayaan

Hubungan antara inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat bersifat saling menguatkan. Pemberdayaan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses perubahan, sementara inovasi sosial menyediakan sarana yang memungkinkan kapasitas tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan kolektif yang menghasilkan perubahan nyata.

Dalam perspektif pemberdayaan, inovasi sosial dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengubah berbagai potensi yang dimiliki menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Proses tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri, solidaritas sosial, dan kemampuan kolektif untuk bertindak.

Cajaiba-Santana (2014) menjelaskan bahwa inovasi sosial merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang menghasilkan perubahan dalam cara masyarakat memahami, mengorganisasi, dan menyelesaikan persoalan bersama. Oleh karena itu, inovasi sosial bukan sekadar produk akhir berupa program atau kegiatan tertentu, melainkan proses transformasi yang mengubah relasi sosial dalam komunitas.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial berfungsi sebagai arena pembelajaran sosial (*social learning*). Melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas inovatif, masyarakat memperoleh pengalaman baru, mengembangkan

keterampilan, memperluas jaringan sosial, dan membangun kapasitas untuk mengelola perubahan secara mandiri. Dengan kata lain, inovasi sosial berkontribusi terhadap peningkatan keberdayaan masyarakat baik pada tingkat individu maupun kolektif.

Selain itu, inovasi sosial juga menjadi sarana munculnya kepemimpinan partisipatif dan tata kelola kolaboratif. Ketika masyarakat terlibat dalam proses inovasi, mereka belajar membangun konsensus, berbagi tanggung jawab, serta mengambil keputusan secara bersama-sama. Kondisi tersebut memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini inovasi sosial dipandang bukan hanya sebagai output dari proses pemberdayaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempercepat transformasi sosial menuju komunitas yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

2.2.4 Keberlanjutan Inovasi Sosial

Salah satu tantangan utama dalam kajian inovasi sosial adalah bagaimana mempertahankan inovasi agar tetap relevan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Banyak inovasi sosial berhasil menciptakan perubahan positif pada tahap awal, tetapi tidak mampu bertahan ketika menghadapi perubahan lingkungan, berkurangnya partisipasi masyarakat, atau terbatasnya sumber daya yang tersedia.

Westley et al. (2014) menjelaskan bahwa keberlanjutan inovasi sosial ditentukan oleh kemampuan komunitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan inovasi sesuai dengan perubahan konteks yang dihadapi. Inovasi yang bersifat statis cenderung mengalami penurunan efektivitas seiring perubahan kebutuhan masyarakat.

Keberlanjutan inovasi sosial tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan program atau organisasi, tetapi juga mencakup keberlanjutan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Suatu inovasi dapat dikatakan berkelanjutan apabila mampu mempertahankan dampak positifnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks komunitas, keberlanjutan inovasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kualitas kepemimpinan, kemampuan regenerasi organisasi, dukungan kelembagaan, serta kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Inovasi yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat umumnya sulit memperoleh legitimasi sosial dan cenderung tidak bertahan lama.

Lebih lanjut, keberlanjutan inovasi sosial juga bergantung pada kemampuan komunitas membangun kapasitas adaptif. Kemampuan ini memungkinkan komunitas mengenali perubahan lingkungan, mengidentifikasi peluang baru, serta melakukan penyesuaian terhadap strategi dan aktivitas yang dijalankan. Dalam perspektif ini, keberlanjutan bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi kemampuan untuk terus berkembang melalui proses pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa inovasi sosial yang berkelanjutan merupakan hasil dari kombinasi antara partisipasi masyarakat, kapasitas kolektif, dukungan lingkungan, dan kemampuan adaptasi komunitas. Perspektif ini menjadi penting dalam penelitian karena memberikan dasar teoritik untuk menjelaskan bagaimana komunitas mampu mempertahankan proses inovasi dan mengubahnya menjadi keberlanjutan multidimensi dalam jangka panjang.

2.3 Keberlanjutan Multidimensi Komunitas

2.3.1 Konsep Keberlanjutan Komunitas

Konsep keberlanjutan (sustainability) pada awalnya berkembang dalam diskursus lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Laporan World Commission on Environment and Development (WCED) melalui Brundtland Report mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987). Seiring perkembangannya, konsep keberlanjutan tidak lagi terbatas pada isu lingkungan, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.

Dalam konteks komunitas, keberlanjutan tidak hanya berarti kemampuan suatu organisasi atau program untuk bertahan dalam jangka panjang. Keberlanjutan komunitas merujuk pada kemampuan masyarakat mempertahankan fungsi sosial, identitas kolektif, kapasitas adaptasi, serta kemampuan menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan di tengah berbagai perubahan lingkungan yang dihadapi.

Magis (2010) mendefinisikan keberlanjutan komunitas sebagai kapasitas komunitas untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui tindakan kolektif yang dilakukan secara berkelanjutan. Perspektif ini menekankan bahwa keberlanjutan bukan sekadar kondisi akhir (outcome), tetapi juga proses sosial yang memungkinkan komunitas terus belajar, beradaptasi, dan berkembang.

Lockwood et al. (2010) menjelaskan bahwa keberlanjutan komunitas merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu indikator tunggal. Sebuah komunitas dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi kehilangan solidaritas sosial, atau memiliki kohesi sosial yang kuat namun mengalami stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai keberlanjutan harus memperhatikan berbagai dimensi kehidupan komunitas secara simultan.

Dalam penelitian ini, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan komunitas untuk mempertahankan nilai, relasi sosial, aktivitas ekonomi, kapasitas kelembagaan, identitas budaya, dan kualitas lingkungan melalui proses pembelajaran, inovasi, serta tindakan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan.

2.3.2 Keberlanjutan Spiritual

Literatur pembangunan modern cenderung menempatkan aspek spiritual sebagai faktor yang berada di luar kajian keberlanjutan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual memiliki kontribusi penting dalam membangun ketahanan dan keberlanjutan komunitas, terutama pada masyarakat yang memiliki basis religius dan budaya yang kuat.

Spiritualitas dalam konteks komunitas tidak hanya berkaitan dengan praktik keagamaan formal, tetapi juga mencakup sistem nilai, orientasi moral, tujuan hidup, dan makna kolektif yang menjadi landasan tindakan sosial. Nilai-nilai seperti keikhlasan, amanah, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta orientasi pada kemaslahatan bersama sering kali menjadi sumber motivasi yang mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam berbagai aktivitas komunitas.

Baker dan Skinner (2006) menjelaskan bahwa spiritual capital merupakan sumber daya yang berasal dari nilai dan keyakinan yang mampu memperkuat komitmen, solidaritas, dan ketahanan sosial masyarakat. Modal spiritual tersebut berfungsi sebagai energi moral yang memungkinkan komunitas mempertahankan aktivitas kolektif meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya material.

Dalam konteks Indonesia, dimensi spiritual sering kali terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat melalui tradisi keagamaan, budaya gotong royong, filantropi sosial, dan berbagai bentuk solidaritas komunitas. Oleh karena itu, keberlanjutan spiritual dapat dipahami sebagai kemampuan komunitas mempertahankan sistem nilai dan orientasi moral yang memberikan makna terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan.

2.3.3 Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial mengacu pada kemampuan komunitas mempertahankan hubungan sosial yang harmonis, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh anggota masyarakat. Dimensi ini menjadi fondasi penting karena hampir seluruh aktivitas kolektif bergantung pada kualitas hubungan sosial yang berkembang dalam komunitas.

Dempsey et al. (2011) menjelaskan bahwa keberlanjutan sosial ditandai oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat, keberadaan rasa saling percaya, solidaritas sosial, serta kemampuan komunitas mengelola konflik secara konstruktif. Komunitas yang memiliki keberlanjutan sosial yang kuat cenderung lebih mampu

mempertahankan partisipasi anggota dan menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Dalam perspektif modal sosial, keberlanjutan sosial tercermin melalui kemampuan komunitas mempertahankan jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang memungkinkan terjadinya kerja sama. Hubungan sosial yang kuat tidak hanya meningkatkan efektivitas tindakan kolektif, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

Oleh karena itu, keberlanjutan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan komunitas mempertahankan kohesi sosial, partisipasi warga, solidaritas, dan hubungan kolaboratif yang mendukung keberlangsungan kehidupan komunitas.

2.3.4 Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan kemampuan komunitas menciptakan, mengelola, dan mempertahankan sumber daya ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dimensi ini tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, diversifikasi sumber penghidupan, serta kemampuan menghadapi berbagai perubahan ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan ekonomi menjadi penting karena menyediakan basis material yang memungkinkan komunitas mempertahankan berbagai aktivitas sosial yang dijalankan. Komunitas yang memiliki kapasitas ekonomi yang memadai cenderung lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

Emery dan Flora (2006) menjelaskan bahwa keberlanjutan ekonomi dalam komunitas tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk modal lainnya, termasuk modal sosial, modal manusia, dan modal budaya. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi yang tidak disertai penguatan relasi sosial dan nilai-nilai komunitas sering kali menghasilkan ketimpangan dan konflik internal.

Dalam penelitian ini, keberlanjutan ekonomi dipahami sebagai kemampuan komunitas menciptakan kesejahteraan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan mendukung keberlangsungan aktivitas komunitas dalam jangka panjang.

2.3.5 Keberlanjutan Kultural

Budaya merupakan sumber daya strategis yang berperan penting dalam membentuk identitas, nilai, dan praktik sosial komunitas. Oleh karena itu, berbagai studi kontemporer mulai menempatkan budaya sebagai salah satu dimensi penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Duxbury et al. (2012) menjelaskan bahwa budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan sosial, tetapi juga sebagai sumber daya yang mendukung kreativitas, inovasi, kohesi sosial, dan ketahanan komunitas. Sementara itu, Soini dan Dessein (2016) menegaskan bahwa budaya dapat dipahami sebagai pilar keberlanjutan, instrumen keberlanjutan, sekaligus fondasi keberlanjutan itu sendiri.

Dalam konteks komunitas, keberlanjutan kultural berkaitan dengan kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, tradisi, nilai, dan praktik budaya yang menjadi ciri khas komunitas tersebut. Namun demikian, keberlanjutan budaya tidak berarti mempertahankan tradisi secara statis. Sebaliknya, keberlanjutan budaya mencerminkan kemampuan komunitas mengadaptasi dan mentransformasikan nilai budaya agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, keberlanjutan kultural dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan komunitas menjaga dan mengembangkan identitas budaya, nilai lokal, serta tradisi sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat.

2.3.6 Keberlanjutan Kelembagaan

Keberlanjutan kelembagaan merujuk pada kemampuan komunitas mempertahankan efektivitas organisasi, kepemimpinan, tata kelola, serta jaringan kemitraan yang mendukung keberlangsungan aktivitas komunitas. Dimensi ini

menjadi penting karena berbagai program pemberdayaan sering kali gagal berlanjut akibat lemahnya kapasitas kelembagaan yang menopang program tersebut.

North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan seperangkat aturan formal dan informal yang membentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat. Institusi berfungsi menciptakan stabilitas, mengurangi ketidakpastian, dan memungkinkan terjadinya kerja sama yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ostrom (1990) menunjukkan bahwa keberhasilan komunitas dalam mengelola sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh keberadaan institusi lokal yang kuat, partisipatif, dan adaptif. Komunitas yang memiliki sistem kepemimpinan yang jelas, mekanisme regenerasi yang efektif, dan tata kelola yang transparan cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, keberlanjutan kelembagaan dipahami sebagai kemampuan komunitas mempertahankan struktur organisasi, kepemimpinan, tata kelola, mekanisme regenerasi, serta jaringan kemitraan yang menopang keberlangsungan aktivitas komunitas.

2.3.7 Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan mengacu pada kemampuan komunitas menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab demi keberlangsungan generasi saat ini maupun generasi mendatang. Dimensi ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya berbagai persoalan ekologis yang dihadapi masyarakat.

Elkington (1997) melalui konsep Triple Bottom Line menegaskan bahwa keberlanjutan harus mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks komunitas, keberlanjutan lingkungan tercermin dalam berbagai praktik pengelolaan sumber daya lokal yang memperhatikan prinsip konservasi, efisiensi, dan tanggung jawab ekologis.

Keberlanjutan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, tetapi juga mencakup berkembangnya kesadaran ekologis dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran tersebut mendorong komunitas untuk mengembangkan berbagai praktik sosial yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini keberlanjutan lingkungan dipahami sebagai kemampuan komunitas mengelola, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

2.3.8 Sintesis Keberlanjutan Multidimensi

Berdasarkan berbagai perspektif teoritik yang telah diuraikan, penelitian ini memandang bahwa keberlanjutan komunitas tidak dapat dijelaskan hanya melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana yang umum digunakan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks komunitas berbasis masyarakat, keberlanjutan juga dipengaruhi oleh kemampuan mempertahankan nilai spiritual, identitas budaya, dan kapasitas kelembagaan yang menopang kehidupan komunitas.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan konsep **Keberlanjutan Multidimensi** yang terdiri atas enam dimensi utama, yaitu:

1. Keberlanjutan Spiritual;
2. Keberlanjutan Sosial;
3. Keberlanjutan Ekonomi;
4. Keberlanjutan Kultural;
5. Keberlanjutan Kelembagaan; dan
6. Keberlanjutan Lingkungan.

Keenam dimensi tersebut dipahami sebagai outcome dari proses transformasi sosial yang berawal dari integrasi nilai, berkembang menjadi modal sosial, dikonversi menjadi kapasitas inovasi kolektif, dan berlangsung dalam konteks institusional, relasional, serta kultural tertentu.

Dengan demikian, keberlanjutan multidimensi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan komunitas mempertahankan nilai spiritual, hubungan sosial, aktivitas ekonomi, identitas budaya, kapasitas kelembagaan, dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran, inovasi, dan tindakan kolektif.

2.4 Modal Sosial dan Kapasitas Inovasi Kolektif

2.4.1 Konsep Modal Sosial

Dalam kajian pembangunan masyarakat dan pemberdayaan komunitas, modal sosial (social capital) merupakan salah satu konsep yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan kemampuan masyarakat dalam membangun kerja sama, memobilisasi sumber daya, dan menghasilkan tindakan kolektif. Berbeda dengan modal ekonomi yang berupa aset material maupun modal manusia yang berupa pengetahuan dan keterampilan individu, modal sosial merujuk pada sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama.

Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan sosial yang relatif permanen. Perspektif ini menekankan bahwa jaringan sosial memberikan keuntungan tertentu bagi individu maupun kelompok karena membuka akses terhadap berbagai sumber daya yang tidak dapat diperoleh secara individual.

Coleman (1988) kemudian memperluas konsep tersebut dengan memandang modal sosial sebagai karakteristik hubungan sosial yang memfasilitasi tindakan kolektif. Menurut Coleman, modal sosial tercermin dalam kewajiban sosial, norma, kepercayaan, dan saluran informasi yang berkembang dalam suatu komunitas. Modal sosial menjadi mekanisme yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, Putnam (2000) mempopulerkan modal sosial sebagai kombinasi antara jaringan sosial, norma timbal balik (*reciprocity*), dan kepercayaan (*trust*) yang memungkinkan masyarakat melakukan koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Dalam perspektif Putnam, komunitas yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi cenderung lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan kolektif, membangun partisipasi warga, serta menghasilkan tata kelola sosial yang lebih efektif.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, modal sosial menjadi aset strategis karena memungkinkan komunitas mengatasi keterbatasan sumber daya ekonomi melalui kerja sama, solidaritas, dan kolaborasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, lebih mampu mengelola konflik, dan lebih berhasil mengembangkan berbagai bentuk inovasi sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang modal sosial sebagai sumber daya kolektif yang terbentuk melalui jaringan sosial, kepercayaan, norma timbal balik, dan hubungan kolaboratif yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan

2.4.2 Dimensi Modal Sosial: *Bonding*, *Bridging*, dan *Linking*

Perkembangan literatur modal sosial menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat tidak bersifat seragam. Individu dan kelompok membangun relasi dalam berbagai bentuk yang memiliki fungsi, karakteristik, dan kontribusi yang berbeda terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai modal sosial tidak cukup hanya melihat keberadaan jaringan sosial (*social networks*), tetapi juga perlu memahami jenis hubungan yang terbentuk serta sumber daya yang dapat diakses melalui hubungan tersebut.

Dalam konteks ini, Michael Woolcock (2001) mengembangkan klasifikasi modal sosial ke dalam tiga dimensi utama, yaitu *bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*. Ketiga dimensi tersebut menjelaskan bagaimana hubungan sosial beroperasi pada tingkat internal komunitas, antar komunitas, maupun antara komunitas dengan institusi yang memiliki otoritas dan sumber daya

yang lebih besar. Klasifikasi ini menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam studi pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi sosial karena mampu menjelaskan mekanisme bagaimana jaringan sosial menghasilkan manfaat kolektif.

Secara konseptual, ketiga dimensi modal sosial tersebut tidak dapat dipahami sebagai kategori yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ketiganya membentuk suatu sistem relasional yang saling melengkapi dalam mendukung kemampuan komunitas untuk bertahan, berkembang, dan berinovasi. Komunitas yang hanya memiliki satu jenis modal sosial tanpa didukung oleh jenis lainnya sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya, membangun kolaborasi, maupun merespons perubahan lingkungan.

a. *Bonding Social Capital*: Fondasi Kohesi dan Solidaritas Internal

Bonding social capital merujuk pada hubungan sosial yang terjalin di antara individu-individu yang memiliki kesamaan identitas, nilai, latar belakang sosial, budaya, agama, etnis, maupun hubungan kekerabatan. Hubungan ini biasanya berkembang dalam kelompok yang relatif homogen dan ditandai oleh tingkat kedekatan emosional yang tinggi, interaksi yang intensif, serta rasa saling percaya yang kuat.

Menurut Robert D. Putnam (2000), *bonding social capital* berfungsi sebagai "lem sosial" (*social glue*) yang menyatukan anggota komunitas. Melalui hubungan yang erat tersebut, masyarakat membangun solidaritas, rasa kebersamaan, serta mekanisme saling membantu yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan kolektif. Dalam banyak komunitas, ikatan keluarga, kelompok keagamaan, kelompok adat, maupun kelompok masyarakat lokal menjadi sumber utama terbentuknya *bonding social capital*.

Fungsi utama *bonding social capital* adalah menciptakan rasa aman sosial (*social security*) dan dukungan sosial (*social support*) bagi anggota komunitas. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi, bencana, atau krisis sosial, anggota komunitas yang memiliki ikatan kuat cenderung saling membantu melalui mekanisme gotong

royong, bantuan sukarela, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, *bonding social capital* sering dipandang sebagai sumber ketahanan sosial (*social resilience*) yang memungkinkan komunitas bertahan dalam situasi yang sulit.

Dalam konteks inovasi sosial, *bonding social capital* menyediakan fondasi awal bagi munculnya tindakan kolektif. Tingginya tingkat kepercayaan dan solidaritas memungkinkan anggota komunitas bekerja sama tanpa harus mengandalkan kontrol formal yang berlebihan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi, keterlibatan, dan komitmen terhadap berbagai aktivitas kolektif.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa *bonding social capital* dapat memiliki sisi negatif apabila berkembang secara eksklusif. Ikatan yang terlalu kuat dalam kelompok tertentu dapat menghasilkan kecenderungan tertutup terhadap pihak luar, memperkuat eksklusivisme kelompok, dan menghambat masuknya ide-ide baru. Fenomena ini sering disebut sebagai *the dark side of social capital*, yaitu kondisi ketika modal sosial yang kuat justru membatasi kemampuan komunitas untuk beradaptasi dan berinovasi (Portes, 1998). Oleh karena itu, *bonding social capital* perlu diimbangi oleh bentuk modal sosial lainnya yang memungkinkan komunitas membangun hubungan yang lebih luas.

b. Bridging Social Capital: Jembatan Pertukaran Pengetahuan dan Kolaborasi

Berbeda dengan *bonding social capital* yang berkembang dalam kelompok yang relatif homogen, *bridging social capital* merujuk pada hubungan sosial yang menghubungkan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda. Hubungan ini dapat terjadi antar komunitas, antar organisasi, antar kelompok profesi, maupun antar kelompok sosial yang memiliki identitas dan pengalaman yang beragam.

Putnam (2000) menggambarkan *bridging social capital* sebagai "pelumas sosial" (*social lubricant*) yang memungkinkan berbagai kelompok membangun hubungan kerja sama meskipun memiliki perbedaan identitas dan kepentingan. Melalui hubungan tersebut, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi baru,

perspektif yang berbeda, serta berbagai sumber daya yang tidak tersedia dalam jaringan internal mereka.

Dalam perspektif teori *embeddedness*, Mark Granovetter (1973; 1985) menjelaskan bahwa hubungan yang bersifat lemah (*weak ties*) sering kali lebih efektif dalam menyediakan informasi baru dibandingkan hubungan yang sangat dekat (*strong ties*). Hubungan dengan kelompok yang berbeda membuka peluang bagi individu untuk mengakses pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang tidak tersedia dalam lingkaran sosialnya sendiri. Oleh karena itu, *bridging social capital* memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap proses pembelajaran dan inovasi.

Dalam konteks inovasi sosial berbasis komunitas, *bridging social capital* memungkinkan terjadinya pertukaran ide, transfer pengetahuan, dan kolaborasi lintas kelompok. Hubungan dengan komunitas lain, organisasi masyarakat sipil, kelompok usaha, maupun jaringan profesional memperluas wawasan komunitas dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan solusi yang lebih kreatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

Selain memperluas akses terhadap informasi, *bridging social capital* juga berperan penting dalam membangun inklusivitas sosial. Komunitas yang memiliki hubungan lintas kelompok umumnya lebih terbuka terhadap keberagaman, lebih toleran terhadap perbedaan, dan lebih mampu membangun kolaborasi dalam lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, *bridging social capital* menjadi mekanisme yang memperkuat kemampuan komunitas untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis.

c. *Linking Social Capital*: Akses terhadap Sumber Daya Strategis dan Kekuasaan

Dimensi ketiga adalah *linking social capital*, yaitu hubungan vertikal yang menghubungkan komunitas dengan aktor, institusi, atau organisasi yang memiliki sumber daya, kewenangan, dan pengaruh yang lebih besar. Hubungan ini dapat terjalin dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, sektor swasta,

organisasi nonpemerintah, maupun berbagai institusi lain yang berada di luar komunitas.

Menurut Woolcock (2001), *linking social capital* menjadi sangat penting karena tidak semua kebutuhan komunitas dapat dipenuhi melalui sumber daya internal. Banyak peluang pengembangan komunitas bergantung pada kemampuan mengakses informasi strategis, dukungan kebijakan, bantuan teknis, pendanaan, maupun jejaring yang lebih luas. Hubungan vertikal tersebut memungkinkan komunitas memperoleh sumber daya yang tidak dapat dihasilkan sendiri.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, *linking social capital* sering dipandang sebagai faktor yang menentukan kemampuan komunitas untuk memperluas skala inovasi (*scaling social innovation*). Banyak inovasi sosial lokal yang berhasil pada tingkat komunitas tetapi gagal berkembang lebih luas karena tidak memiliki akses terhadap dukungan kelembagaan dan sumber daya eksternal. Sebaliknya, komunitas yang mampu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai institusi sering kali lebih berhasil memperluas dampak inovasi yang mereka kembangkan.

Selain berfungsi sebagai saluran akses sumber daya, *linking social capital* juga meningkatkan legitimasi sosial dan politik komunitas. Hubungan yang baik dengan pemerintah maupun institusi lain dapat memperkuat posisi tawar komunitas dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan peluang mereka untuk memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Integrasi Bonding, Bridging, dan Linking dalam Kapasitas Inovasi Komunitas

Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiga dimensi modal sosial tersebut bekerja secara saling melengkapi. *Bonding social capital* menciptakan fondasi kepercayaan, solidaritas, dan kohesi internal yang memungkinkan komunitas bertindak secara kolektif. *Bridging social capital* memperluas akses terhadap informasi, pengetahuan, dan kolaborasi lintas kelompok. Sementara itu, *linking social capital* membuka akses terhadap sumber daya strategis, dukungan kelembagaan, dan peluang pengembangan yang lebih luas.

Dalam konteks inovasi sosial, kombinasi ketiga dimensi tersebut menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya kapasitas inovasi kolektif. Komunitas yang hanya memiliki *bonding social capital* cenderung kuat secara internal tetapi kurang adaptif terhadap perubahan. Sebaliknya, komunitas yang hanya mengandalkan *bridging* dan *linking* tanpa didukung kohesi internal yang kuat sering mengalami kesulitan dalam membangun komitmen dan partisipasi anggota.

Oleh karena itu, kapasitas inovasi kolektif berkembang secara optimal ketika komunitas mampu mengintegrasikan ketiga bentuk modal sosial tersebut secara seimbang. Integrasi tersebut memungkinkan komunitas membangun kepercayaan internal, mengakses pengetahuan baru, memperoleh dukungan eksternal, serta mengembangkan berbagai bentuk inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka penelitian ini, kombinasi *bonding*, *bridging*, dan *linking social capital* diposisikan sebagai mekanisme struktural yang menghubungkan integrasi nilai dengan proses pembentukan *trust*, *collective efficacy*, *collaborative learning*, dan pada akhirnya kapasitas inovasi kolektif yang menopang keberlanjutan multidimensi komunitas.

2.4.3 Modal Sosial dalam Komunitas Multi-Etnis dan Peri-Urban

Komunitas yang berada pada wilayah peri-urban umumnya memiliki karakteristik sosial yang lebih kompleks dibandingkan komunitas pedesaan tradisional. Proses urbanisasi, mobilitas penduduk, serta interaksi berbagai kelompok sosial menciptakan masyarakat yang lebih heterogen dari segi etnis, agama, pekerjaan, dan status sosial.

Dalam kondisi tersebut, pengelolaan modal sosial menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan komunitas menjaga kohesi sosial sekaligus membangun kolaborasi lintas kelompok. Ketergantungan yang berlebihan pada *bonding social capital* dapat memperkuat solidaritas internal, tetapi berpotensi menciptakan eksklusivitas sosial. Sebaliknya, penguatan *bridging* dan *linking social capital* memungkinkan komunitas membangun hubungan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan.

Literatur menunjukkan bahwa komunitas yang berhasil mengintegrasikan bonding, bridging, dan linking social capital cenderung memiliki kapasitas adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan komunitas yang hanya mengandalkan salah satu bentuk modal sosial. Mereka tidak hanya mampu mempertahankan solidaritas internal, tetapi juga mampu menjalin kolaborasi lintas kelompok dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai aktor eksternal.

Kondisi tersebut menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena komunitas Payungi berkembang dalam lingkungan sosial yang relatif heterogen serta melibatkan berbagai aktor dari sektor masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif.

2.4.4 Kapasitas Inovasi Kolektif

Keberhasilan komunitas dalam menghasilkan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kreativitas individu, tetapi juga oleh kemampuan komunitas mengembangkan kapasitas inovasi kolektif (*collective innovation capacity*). Kapasitas inovasi kolektif merujuk pada kemampuan suatu komunitas untuk menciptakan, mengadopsi, mengembangkan, dan mempertahankan berbagai solusi baru secara bersama-sama guna menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Konsep ini berakar pada literatur social innovation, collective action, dan community innovation yang memandang inovasi sebagai hasil interaksi sosial, bukan semata-mata produk kreativitas individu. Mulgan et al. (2007) menjelaskan bahwa inovasi sosial lahir melalui kolaborasi berbagai aktor yang memiliki tujuan bersama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Sementara itu, Moulaert et al. (2013) menegaskan bahwa inovasi sosial tidak hanya menghasilkan solusi baru, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif.

Kapasitas inovasi kolektif mencakup kemampuan komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial, menghasilkan ide-ide baru, mengorganisasi sumber daya, memobilisasi partisipasi masyarakat, membangun konsensus, serta mempertahankan komitmen terhadap proses perubahan yang berlangsung.

Dalam penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif dipahami sebagai kemampuan komunitas mengembangkan dan mempertahankan solusi sosial baru melalui proses kolaboratif yang melibatkan partisipasi, pembelajaran, dan tindakan kolektif masyarakat.

2.4.5 Mekanisme Transformasi Modal Sosial menjadi Kapasitas Inovasi Kolektif

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif antara modal sosial dan inovasi, mekanisme yang menjelaskan bagaimana modal sosial ditransformasikan menjadi kapasitas inovasi kolektif masih relatif terbatas. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa transformasi tersebut tidak berlangsung secara otomatis, melainkan melalui serangkaian mekanisme sosial yang saling berkaitan.

a. Trust sebagai Fondasi Interaksi Kolektif

Trust (kepercayaan) merupakan elemen fundamental dalam modal sosial yang memungkinkan individu maupun kelompok membangun hubungan kerja sama yang stabil, produktif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif modal sosial, kepercayaan tidak hanya dipahami sebagai keyakinan terhadap integritas dan niat baik pihak lain, tetapi juga sebagai ekspektasi bahwa anggota komunitas akan bertindak sesuai norma, nilai, dan komitmen bersama yang telah disepakati. Keberadaan trust menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya tindakan kolektif karena memungkinkan individu berinteraksi tanpa harus selalu mengandalkan pengawasan, kontrak formal, atau mekanisme kontrol yang kompleks.

Menurut Francis Fukuyama (1995), masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung mampu membangun kerja sama yang lebih luas karena biaya transaksi sosial menjadi lebih rendah. Kepercayaan mengurangi kebutuhan akan pengawasan yang berlebihan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi koordinasi antaranggota. Dalam konteks komunitas, kondisi ini memungkinkan sumber daya sosial, informasi, dan pengetahuan

mengalir secara lebih terbuka sehingga memperkuat kapasitas kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Robert D. Putnam (2000) yang menempatkan kepercayaan sebagai salah satu komponen utama modal sosial bersama jaringan sosial (social networks) dan norma resiprositas (norms of reciprocity). Putnam menegaskan bahwa komunitas yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung menunjukkan partisipasi sosial yang lebih kuat, kemampuan kolaborasi yang lebih baik, serta kapasitas yang lebih besar dalam menghasilkan manfaat kolektif. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya menjadi hasil dari interaksi sosial yang berlangsung lama, tetapi juga menjadi sumber daya yang terus memperkuat keberlangsungan interaksi tersebut.

Dalam perspektif relasional, kepercayaan berkembang melalui pengalaman interaksi yang berulang, keterbukaan komunikasi, konsistensi perilaku, serta keberhasilan anggota dalam memenuhi harapan satu sama lain. Semakin sering individu berinteraksi dalam suasana yang positif dan saling menguntungkan, semakin kuat pula tingkat kepercayaan yang terbentuk. Oleh karena itu, kepercayaan bukanlah kondisi yang muncul secara instan, melainkan hasil akumulasi pengalaman sosial yang berlangsung dalam jangka panjang (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

Kepercayaan memiliki peran strategis dalam mendorong proses pembelajaran sosial (social learning) dan pertukaran pengetahuan (knowledge sharing). Ketika anggota komunitas saling percaya, mereka cenderung lebih terbuka untuk berbagi pengalaman, keterampilan, informasi, maupun sumber daya yang dimiliki. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan sering kali menyebabkan individu menyimpan informasi, menghindari kolaborasi, dan membatasi keterlibatan dalam aktivitas kolektif karena adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan informasi atau perilaku oportunistik dari pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu komunitas dalam mengelola pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kepercayaan yang berkembang di dalamnya.

Lebih jauh, kepercayaan menciptakan lingkungan sosial yang aman (psychological safety) bagi anggota komunitas untuk melakukan eksperimen, mengemukakan ide-ide baru, dan mengambil risiko sosial tanpa takut mendapat penolakan atau sanksi dari kelompok. Lingkungan yang ditandai oleh tingginya tingkat kepercayaan mendorong munculnya kreativitas, diskusi kritis, dan keberanian untuk mencoba pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks inovasi sosial, kondisi tersebut menjadi faktor penting karena inovasi pada dasarnya lahir dari keberanian anggota komunitas untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Dari sudut pandang teori embeddedness, Mark Granovetter (1985) menjelaskan bahwa tindakan ekonomi dan sosial selalu tertanam (embedded) dalam jaringan hubungan sosial. Dalam jaringan tersebut, kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan individu dengan sumber daya, informasi, dan peluang kolaborasi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam jaringan sosial, semakin besar kemungkinan terjadinya pertukaran pengetahuan dan kerja sama yang produktif. Dengan kata lain, kepercayaan menjadi jembatan yang menghubungkan modal sosial dengan berbagai proses kolektif yang menghasilkan nilai tambah bagi komunitas.

Dalam konteks penelitian ini, trust diposisikan sebagai mekanisme awal yang menjelaskan bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang tertanam dalam komunitas dapat ditransformasikan menjadi tindakan kolektif yang produktif. Nilai-nilai bersama yang terus direproduksi melalui interaksi sosial membangun rasa saling percaya antaranggota komunitas. Kepercayaan tersebut kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya keyakinan kolektif (collective efficacy), pembelajaran kolaboratif (collaborative learning), dan pada akhirnya kapasitas inovasi kolektif (collective innovation capacity). Dengan demikian, trust tidak hanya berfungsi sebagai komponen modal sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penghubung (mediating mechanism) yang menjelaskan bagaimana modal sosial dapat menghasilkan inovasi dan keberlanjutan komunitas.

b. *Collective Efficacy* sebagai Penggerak Tindakan Kolektif

Collective efficacy merupakan konsep yang menjelaskan keyakinan bersama suatu kelompok terhadap kemampuan mereka untuk mengorganisasi, mengoordinasikan, dan melaksanakan tindakan kolektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep ini dikembangkan oleh Albert Bandura (2000) dalam kerangka *Social Cognitive Theory*, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kelompok tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh tingkat keyakinan anggotanya bahwa mereka mampu menggunakan sumber daya tersebut secara efektif untuk menghasilkan perubahan.

Menurut Bandura, *collective efficacy* berbeda dengan *self-efficacy*. Jika *self-efficacy* merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri, maka *collective efficacy* mengacu pada keyakinan bersama anggota kelompok mengenai kapasitas kolektif mereka dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *collective efficacy* merupakan konstruksi sosial yang lahir dari interaksi, pengalaman bersama, dan persepsi kolektif mengenai kemampuan kelompok.

Dalam konteks komunitas, *collective efficacy* menjadi faktor penting yang menentukan apakah modal sosial yang dimiliki dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Jaringan sosial yang kuat dan hubungan yang dilandasi kepercayaan tidak secara otomatis menghasilkan perubahan apabila anggota komunitas tidak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu bertindak secara bersama-sama. Oleh karena itu, *collective efficacy* berfungsi sebagai mekanisme psikososial yang mengubah hubungan sosial menjadi energi kolektif untuk bertindak.

Kepercayaan yang telah terbentuk melalui interaksi sosial berulang menjadi fondasi utama lahirnya *collective efficacy*. Ketika anggota komunitas saling percaya, mereka lebih mudah membangun persepsi positif mengenai kemampuan kelompoknya. Pengalaman keberhasilan yang dicapai bersama, kemampuan menyelesaikan masalah secara kolektif, serta keberhasilan menghadapi berbagai tantangan sebelumnya akan memperkuat keyakinan bahwa kelompok memiliki kapasitas untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya,

komunitas yang mengalami konflik berkepanjangan, kegagalan berulang, atau rendahnya tingkat partisipasi cenderung memiliki *collective efficacy* yang lemah.

Sampson, Raudenbush, dan Earls (1997) menjelaskan bahwa *collective efficacy* tidak hanya berkaitan dengan rasa percaya antaranggota, tetapi juga mencakup kesediaan mereka untuk melakukan intervensi sosial demi kepentingan bersama. Dalam penelitian mereka mengenai komunitas perkotaan, *collective efficacy* terbukti menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan masalah bersama, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa *collective efficacy* merupakan kombinasi antara kohesi sosial dan kemauan untuk bertindak demi kepentingan kolektif.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, *collective efficacy* memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kapasitas komunitas untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Komunitas yang memiliki tingkat *collective efficacy* tinggi cenderung lebih optimis dalam menghadapi tantangan, lebih tangguh ketika menghadapi hambatan, dan lebih mampu memobilisasi sumber daya yang tersedia. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan karena memiliki keyakinan bahwa melalui kerja sama dan usaha bersama, berbagai kendala dapat diatasi.

Selain itu, *collective efficacy* berperan penting dalam mendorong partisipasi dan keterlibatan anggota komunitas. Ketika individu meyakini bahwa kontribusi mereka akan memberikan dampak terhadap keberhasilan kelompok, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas. Sebaliknya, apabila anggota merasa bahwa kelompok tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tingkat partisipasi akan menurun dan semangat kolektif menjadi melemah. Oleh karena itu, *collective efficacy* sering dipandang sebagai faktor yang menjembatani hubungan antara modal sosial dan tindakan kolektif.

Dalam proses inovasi sosial, *collective efficacy* memiliki peran yang sangat penting karena inovasi pada dasarnya selalu mengandung unsur ketidakpastian dan risiko. Upaya mengembangkan program baru, menciptakan solusi alternatif, atau memperkenalkan perubahan dalam komunitas memerlukan keberanian untuk keluar dari pola-pola lama yang telah mapan. Komunitas dengan tingkat *collective efficacy* yang tinggi umumnya lebih berani mengambil risiko, lebih terbuka terhadap ide-ide baru, dan lebih percaya diri dalam mengembangkan berbagai bentuk inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Keyakinan kolektif tersebut menjadi sumber motivasi yang mendorong anggota komunitas untuk terus berupaya meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Dalam perspektif teori ekologi sosial yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1979), kemampuan kolektif suatu komunitas tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik internal kelompok, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dukungan institusi, akses terhadap sumber daya eksternal, hubungan dengan pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat keyakinan komunitas terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, *collective efficacy* berkembang melalui interaksi antara faktor internal komunitas dan faktor eksternal yang membentuk lingkungan pendukung.

Dalam kerangka penelitian ini, *collective efficacy* diposisikan sebagai mekanisme lanjutan setelah terbentuknya *trust*. Kepercayaan yang berkembang melalui modal sosial menciptakan keyakinan bahwa anggota komunitas dapat bekerja sama secara efektif. Keyakinan tersebut kemudian berkembang menjadi *collective efficacy*, yaitu kepercayaan bersama terhadap kemampuan komunitas dalam mengorganisasi tindakan kolektif. Selanjutnya, *collective efficacy* menjadi pendorong munculnya *collaborative learning*, karena komunitas yang yakin terhadap kemampuannya akan lebih terdorong untuk berbagi pengetahuan, belajar bersama, dan mengeksplorasi berbagai solusi inovatif. Dengan demikian, *collective efficacy* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan *trust* dengan proses pembelajaran kolaboratif yang pada akhirnya menghasilkan kapasitas inovasi kolektif.

Secara konseptual, semakin tinggi tingkat *collective efficacy* dalam suatu komunitas, semakin besar pula kemampuan komunitas tersebut untuk memobilisasi sumber daya, mengatasi tantangan, membangun inovasi, dan mempertahankan keberlanjutan program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, *collective efficacy* dapat dipahami sebagai energi psikososial kolektif yang mengubah kepercayaan sosial menjadi tindakan nyata yang berorientasi pada perubahan dan pembangunan komunitas.

c. Collaborative Learning sebagai Produksi Pengetahuan Kolektif

Collaborative learning merupakan proses pembelajaran yang terjadi melalui interaksi sosial, pertukaran pengalaman, refleksi bersama, dan konstruksi makna secara kolektif di antara anggota suatu kelompok atau komunitas. Berbeda dengan pembelajaran individual yang berpusat pada akumulasi pengetahuan oleh individu, *collaborative learning* menempatkan pengetahuan sebagai hasil dari proses sosial yang dibangun melalui komunikasi, dialog, kerja sama, dan pengalaman bersama. Dalam konteks komunitas, proses ini menjadi sarana utama untuk mengintegrasikan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang tersebar di antara anggota sehingga menghasilkan kapasitas kolektif yang lebih besar dibandingkan kemampuan individu secara terpisah.

Konsep *collaborative learning* memperoleh landasan teoritik yang kuat melalui pemikiran Etienne Wenger (1998) tentang *Community of Practice*. Wenger menjelaskan bahwa pembelajaran bukan sekadar proses transfer informasi, melainkan proses partisipasi sosial yang berlangsung ketika individu terlibat secara aktif dalam praktik bersama (*shared practice*). Melalui keterlibatan tersebut, anggota komunitas tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga secara kolektif membangun pemahaman, nilai, identitas, dan cara bertindak yang menjadi karakteristik komunitas itu sendiri.

Menurut Wenger, terdapat tiga elemen utama dalam *Community of Practice*, yaitu *mutual engagement* (keterlibatan bersama), *joint enterprise* (tujuan bersama), dan *shared repertoire* (sumber daya pengetahuan bersama). Ketiga elemen tersebut memungkinkan anggota komunitas belajar secara berkelanjutan melalui interaksi

yang berlangsung dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu tertentu, tetapi sebagai aset kolektif yang terus berkembang melalui partisipasi anggota komunitas.

Dalam perspektif konstruktivisme sosial, proses pembelajaran kolektif terjadi karena individu membangun pemahaman baru melalui interaksi dengan orang lain. Pemikiran Lev Vygotsky menegaskan bahwa perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Melalui dialog, kolaborasi, dan pertukaran gagasan, individu dapat mengakses perspektif yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dibandingkan pembelajaran yang dilakukan secara individual. Oleh karena itu, komunitas menjadi arena penting bagi terciptanya proses belajar yang dinamis dan inovatif.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, *collaborative learning* memungkinkan pengalaman individual ditransformasikan menjadi pengetahuan kolektif yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota komunitas. Berbagai pengalaman yang diperoleh anggota dalam menghadapi masalah, menjalankan program, atau mengembangkan usaha tidak berhenti sebagai pengetahuan personal, tetapi dibagikan melalui forum diskusi, musyawarah, pelatihan, pendampingan, maupun aktivitas kolaboratif lainnya. Melalui proses tersebut, komunitas secara bertahap membangun basis pengetahuan bersama (*shared knowledge base*) yang menjadi sumber pembelajaran berkelanjutan.

Lebih lanjut, *collaborative learning* memiliki peran penting dalam menciptakan proses refleksi kolektif (*collective reflection*). Refleksi memungkinkan anggota komunitas mengevaluasi pengalaman yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan, serta merumuskan strategi perbaikan untuk masa mendatang. Proses reflektif ini menjadi mekanisme penting dalam pembelajaran organisasi dan komunitas karena membantu kelompok menghindari pengulangan kesalahan serta meningkatkan efektivitas tindakan kolektif yang dilakukan.

Pemikiran Chris Argyris dan Donald Schön (1978) mengenai *organizational learning* menunjukkan bahwa kemampuan suatu organisasi atau komunitas untuk belajar dari pengalaman merupakan faktor kunci dalam menghasilkan perubahan

dan inovasi. Komunitas yang mampu melakukan refleksi kritis terhadap praktik-praktik yang dijalankan akan lebih mudah mengembangkan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Dalam konteks ini, *collaborative learning* menjadi sarana yang memungkinkan proses pembelajaran tersebut berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain menghasilkan pengetahuan baru, *collaborative learning* juga memperkuat hubungan sosial antaranggota komunitas. Proses berbagi pengalaman, berdiskusi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah mendorong terbentuknya rasa saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif tidak hanya menghasilkan manfaat kognitif berupa pengetahuan baru, tetapi juga memperkuat dimensi relasional yang menjadi fondasi modal sosial komunitas.

Dalam perspektif inovasi sosial, *collaborative learning* berfungsi sebagai mekanisme utama yang menghasilkan ide, pengetahuan, dan solusi baru. Inovasi jarang lahir dari pemikiran individu yang bekerja secara terisolasi. Sebaliknya, inovasi umumnya muncul dari proses interaksi berbagai aktor yang membawa pengalaman, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda. Ketika anggota komunitas terlibat dalam pembelajaran kolaboratif, mereka memiliki kesempatan untuk mengombinasikan berbagai pengetahuan yang dimiliki sehingga menghasilkan gagasan baru yang lebih kreatif dan adaptif. Proses ini dikenal sebagai *knowledge recombination*, yaitu penggabungan berbagai sumber pengetahuan menjadi bentuk solusi baru yang bernilai bagi komunitas.

Dari perspektif *knowledge creation theory*, Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi (1995) menjelaskan bahwa pengetahuan baru lahir melalui proses interaksi berkelanjutan antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Dalam komunitas, pengalaman praktis yang dimiliki individu (*tacit knowledge*) dapat dibagikan melalui diskusi, demonstrasi, dan praktik bersama, kemudian dikonversi menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh anggota lain. Proses konversi pengetahuan ini memperkuat kemampuan komunitas untuk belajar secara kolektif dan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.

Dalam kerangka penelitian ini, *collaborative learning* diposisikan sebagai mekanisme yang mengikuti terbentuknya *trust* dan *collective efficacy*. Kepercayaan menciptakan ruang sosial yang aman untuk berbagi informasi dan pengalaman, sementara *collective efficacy* membangun keyakinan bahwa komunitas mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kedua kondisi tersebut menjadi prasyarat bagi berkembangnya proses pembelajaran kolaboratif. Ketika anggota komunitas saling percaya dan memiliki keyakinan terhadap kapasitas kolektifnya, mereka lebih terbuka untuk bertukar pengetahuan, melakukan eksperimen, mengevaluasi pengalaman, dan mengembangkan solusi baru secara bersama-sama.

Melalui proses tersebut, *collaborative learning* menghasilkan akumulasi pengetahuan kolektif yang menjadi sumber utama lahirnya *collective innovation capacity*. Pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya membantu komunitas menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan demikian, *collaborative learning* berfungsi sebagai mekanisme transformasi yang mengubah modal sosial dan keyakinan kolektif menjadi kapasitas inovasi yang mampu menghasilkan perubahan berkelanjutan.

Secara konseptual, ketiga mekanisme yang telah dibahas—*trust*, *collective efficacy*, dan *collaborative learning*—membentuk suatu rantai transformasi yang menjelaskan bagaimana modal sosial berkembang menjadi kapasitas inovasi kolektif. *Trust* menciptakan ruang interaksi yang terbuka dan aman, *collective efficacy* membangun keyakinan bersama untuk bertindak, sedangkan *collaborative learning* menghasilkan pengetahuan kolektif yang menjadi fondasi munculnya inovasi sosial. Ketiganya bekerja secara berurutan dan saling memperkuat sehingga membentuk mekanisme internal yang menjelaskan proses transformasi nilai dan modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif dalam komunitas.

2.4.6 *Dynamic Capability Theory* dan Kapasitas Inovasi Komunitas

Untuk menjelaskan bagaimana kapasitas inovasi kolektif dapat dipertahankan dan berkembang secara berkelanjutan, penelitian ini mengadopsi *Dynamic Capability Theory* yang dikembangkan oleh David J. Teece. Teori ini berangkat dari kritik

terhadap pendekatan berbasis sumber daya (*Resource-Based View/RBV*) yang dinilai lebih mampu menjelaskan keunggulan organisasi dalam kondisi lingkungan yang relatif stabil, namun kurang memadai untuk menjelaskan bagaimana organisasi bertahan dan berkembang dalam situasi yang dinamis, penuh ketidakpastian, dan terus mengalami perubahan. Menurut Teece (2007), keunggulan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya, tetapi terutama oleh kemampuan untuk secara terus-menerus memperbarui, mengombinasikan, dan mentransformasikan sumber daya tersebut agar sesuai dengan perubahan lingkungan.

Dalam kerangka *Dynamic Capability Theory*, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dijelaskan melalui tiga proses utama, yaitu *sensing*, *seizing*, dan *transforming*. Ketiga proses tersebut membentuk suatu siklus adaptasi yang memungkinkan organisasi maupun komunitas tidak hanya bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga memanfaatkan perubahan tersebut sebagai peluang untuk berkembang.

a. *Sensing*: Kemampuan Mengenal Peluang dan Tantangan

Sensing merujuk pada kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal maupun internal. Kemampuan ini mencakup aktivitas mengamati tren, membaca kebutuhan masyarakat, mengenali permasalahan baru, menangkap peluang ekonomi, memahami perubahan kebijakan, serta mengidentifikasi berbagai sumber daya yang berpotensi dikembangkan.

Menurut Teece (2007), organisasi yang memiliki kemampuan *sensing* yang kuat cenderung lebih responsif terhadap perubahan karena mampu mendeteksi peluang dan ancaman lebih awal dibandingkan organisasi lain. Kemampuan ini sangat bergantung pada kualitas informasi yang dimiliki, keterbukaan terhadap pembelajaran, serta kemampuan membangun jaringan dengan berbagai aktor yang berada di luar organisasi.

Dalam konteks komunitas, *sensing* tercermin pada kemampuan masyarakat untuk membaca perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Komunitas yang memiliki jaringan sosial luas, hubungan kemitraan yang kuat, dan budaya belajar yang baik biasanya lebih mudah memperoleh informasi baru yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan komunitas. Dengan demikian, modal sosial dan pembelajaran kolaboratif menjadi fondasi penting bagi berkembangnya kemampuan *sensing* dalam komunitas.

Sebagai contoh, komunitas yang aktif berinteraksi dengan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat luas akan lebih cepat mengenali peluang pendanaan, kebutuhan pasar baru, maupun peluang inovasi sosial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. *Seizing*: Kemampuan Memobilisasi dan Mengoptimalkan Sumber Daya

Setelah peluang berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah *seizing*, yaitu kemampuan memanfaatkan peluang tersebut melalui mobilisasi sumber daya yang tersedia. *Seizing* mencakup proses pengambilan keputusan, pengorganisasian sumber daya, pembentukan strategi, serta pelaksanaan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan peluang menjadi hasil yang nyata.

Teece (2007) menjelaskan bahwa banyak organisasi mampu mengenali peluang, tetapi tidak semuanya mampu memanfaatkannya secara efektif. Oleh karena itu, *seizing* menjadi kemampuan yang menentukan apakah peluang yang telah teridentifikasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan produktif dan menghasilkan nilai bagi organisasi maupun komunitas.

Dalam konteks komunitas, *seizing* tercermin pada kemampuan masyarakat mengorganisasi sumber daya sosial, ekonomi, manusia, dan kelembagaan untuk menjalankan berbagai program inovatif. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sumber daya, tetapi juga dengan kemampuan komunitas membangun koordinasi, partisipasi, kepemimpinan, dan kerja sama yang efektif.

Pada tahap ini, peran *trust*, *collective efficacy*, dan *collaborative learning* menjadi sangat penting. Kepercayaan memungkinkan anggota komunitas bekerja sama secara terbuka, *collective efficacy* membangun keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai bersama, sedangkan *collaborative learning* menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan solusi yang tepat. Dengan kata lain, ketiga mekanisme tersebut menjadi fondasi yang memungkinkan komunitas mengubah peluang menjadi tindakan nyata.

c. *Transforming*: Kemampuan Beradaptasi dan Memperbarui Kapasitas

Proses ketiga dalam *Dynamic Capability Theory* adalah *transforming*, yaitu kemampuan melakukan pembaruan, penyesuaian, dan transformasi secara berkelanjutan agar organisasi tetap relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kemampuan ini mencakup pembelajaran berkelanjutan, restrukturisasi kelembagaan, pengembangan kompetensi baru, serta penciptaan pola kerja yang lebih adaptif.

Menurut Teece (2007), lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk terus melakukan perubahan. Strategi, struktur, maupun praktik yang berhasil pada masa lalu belum tentu tetap efektif pada masa mendatang. Oleh karena itu, kemampuan melakukan transformasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan organisasi.

Dalam konteks komunitas, *transforming* tercermin pada kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi pengalaman, memperbaiki praktik yang kurang efektif, mengadopsi pendekatan baru, dan mengembangkan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah. Komunitas yang memiliki budaya refleksi dan pembelajaran yang kuat umumnya lebih mampu melakukan proses transformasi dibandingkan komunitas yang cenderung mempertahankan pola lama secara kaku.

Kemampuan transformasi ini juga berkaitan erat dengan konsep inovasi sosial. Inovasi yang berhasil tidak berhenti pada penciptaan solusi baru, tetapi terus mengalami penyempurnaan melalui proses adaptasi dan pembelajaran

berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi menjadi mekanisme yang memastikan bahwa inovasi tetap relevan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dynamic Capability sebagai Dasar Kapasitas Inovasi Kolektif

Dalam penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif dipahami sebagai bentuk *dynamic capability* yang berkembang pada tingkat komunitas. Kapasitas inovasi kolektif tidak hanya merujuk pada kemampuan menghasilkan ide atau program baru, tetapi juga mencakup kemampuan komunitas untuk secara terus-menerus mengenali peluang (*sensing*), memobilisasi sumber daya untuk memanfaatkan peluang tersebut (*seizing*), serta melakukan pembaruan dan adaptasi berkelanjutan (*transforming*).

Perspektif ini penting karena inovasi dalam komunitas bukanlah peristiwa yang bersifat sesaat (*one-shot innovation*), melainkan proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Keberhasilan suatu komunitas tidak ditentukan oleh kemampuan menghasilkan satu inovasi tertentu, tetapi oleh kemampuannya membangun sistem pembelajaran dan adaptasi yang memungkinkan inovasi terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif merupakan hasil dari interaksi antara integrasi nilai, modal sosial, *trust*, *collective efficacy*, dan *collaborative learning*. Namun, agar kapasitas tersebut mampu menghasilkan keberlanjutan multidimensi, komunitas perlu memiliki kemampuan dinamis untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, *Dynamic Capability Theory* berfungsi sebagai landasan teoritik yang menjelaskan mengapa kapasitas inovasi kolektif dapat menjadi faktor utama yang menghubungkan proses pemberdayaan masyarakat dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, spiritual, dan kelembagaan.

Dengan demikian, penelitian ini memandang kapasitas inovasi kolektif bukan sekadar output dari modal sosial, melainkan sebagai kemampuan dinamis (*dynamic capability*) yang memungkinkan komunitas terus belajar, beradaptasi, mengelola

perubahan, dan menciptakan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi kemampuan komunitas dalam melakukan *sensing*, *seizing*, dan *transforming*, semakin besar pula peluang komunitas tersebut untuk mencapai keberlanjutan pembangunan yang bersifat jangka panjang dan multidimensional.

2.4.7 Sintesis Teoretik Transformasi Modal Sosial menjadi Kapasitas Inovasi Kolektif dan Keberlanjutan Multidimensi

Berdasarkan sintesis teori modal sosial, *collective efficacy*, *collaborative learning*, inovasi sosial, dan *dynamic capability*, penelitian ini berargumen bahwa modal sosial tidak secara langsung menghasilkan keberlanjutan komunitas.

Modal sosial terlebih dahulu ditransformasikan melalui *trust*, *collective efficacy*, dan *collaborative learning* yang kemudian menghasilkan kapasitas inovasi kolektif. Kapasitas inovasi kolektif tersebut memungkinkan komunitas menciptakan berbagai solusi sosial yang memperkuat keberlanjutan spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan proposisi bahwa keberlanjutan multidimensi komunitas merupakan hasil dari proses transformasi sosial yang dimulai dari modal sosial, diperkuat oleh mekanisme pembelajaran dan keyakinan kolektif, serta diwujudkan melalui kapasitas inovasi kolektif yang berkembang dalam komunitas.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Penelitian tentang Integrasi Nilai dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kajian mengenai nilai dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa nilai merupakan faktor penting yang memengaruhi partisipasi, solidaritas sosial, dan keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Berbagai penelitian menemukan bahwa nilai spiritual, sosial, budaya, dan kearifan lokal berperan dalam membentuk orientasi tindakan masyarakat serta memperkuat komitmen kolektif dalam mencapai tujuan bersama.

Penelitian Dwianto et al. (2023) menunjukkan bahwa internalisasi nilai lokal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan berbasis komunitas. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memperkuat keterlibatan warga dalam berbagai aktivitas pembangunan. Temuan serupa disampaikan Rahman dan Hidayat (2022) yang menemukan bahwa nilai keagamaan berkontribusi terhadap pembentukan solidaritas sosial dan keberlanjutan berbagai program sosial di tingkat komunitas.

Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, berbagai studi menunjukkan bahwa nilai tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang memperkuat rasa memiliki, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap keberlanjutan program. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih memosisikan nilai sebagai faktor pendukung partisipasi atau kohesi sosial tanpa menjelaskan bagaimana nilai tersebut ditransformasikan menjadi sumber daya sosial yang lebih produktif.

Sintesis

Penelitian terdahulu telah membuktikan pentingnya nilai dalam membentuk perilaku kolektif dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan mekanisme transformasi integrasi nilai menjadi modal sosial yang kemudian menghasilkan kapasitas inovasi kolektif. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu fokus utama penelitian ini.

2.5.2 Penelitian tentang Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Modal sosial merupakan salah satu konsep yang paling dominan dalam studi pembangunan komunitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial memiliki kontribusi penting terhadap keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Woolcock dan Narayan (2000) menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki bonding, bridging, dan linking social capital yang kuat cenderung lebih mampu mengakses sumber daya dan mengembangkan tindakan kolektif. Pretty dan Ward

(2001) juga menemukan bahwa modal sosial berkontribusi terhadap keberhasilan masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kerja sama komunitas, serta mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan berbasis masyarakat. Modal sosial juga terbukti menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, dan penguatan kelembagaan komunitas.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian berhenti pada penjelasan mengenai hubungan antara modal sosial dan keberhasilan program pemberdayaan. Penjelasan mengenai proses konversi modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif masih relatif terbatas.

Sintesis

Literatur menunjukkan bahwa modal sosial merupakan sumber daya penting dalam tindakan kolektif masyarakat. Namun demikian, mekanisme yang menjelaskan bagaimana modal sosial ditransformasikan menjadi kapasitas inovasi kolektif masih belum banyak dikaji secara mendalam.

2.5.3 Penelitian tentang Inovasi Sosial dan Kapasitas Inovasi Kolektif

Perkembangan studi inovasi sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa inovasi sosial berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas komunitas, dan penciptaan solusi baru terhadap berbagai persoalan sosial.

Mulgan et al. (2007), Moulaert et al. (2013), dan Cajaiba-Santana (2014) menegaskan bahwa inovasi sosial merupakan proses kolektif yang menghasilkan perubahan dalam cara masyarakat memahami dan menyelesaikan persoalan bersama. Inovasi sosial tidak hanya menghasilkan produk atau program baru, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang lebih inklusif dan partisipatif.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian inovasi sosial lebih berfokus pada bentuk inovasi yang dihasilkan daripada mekanisme sosial yang memungkinkan inovasi tersebut berkembang. Kajian mengenai kapasitas inovasi kolektif sebagai kemampuan komunitas untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mempertahankan inovasi masih relatif terbatas.

Sintesis

Penelitian terdahulu telah menjelaskan pentingnya inovasi sosial dalam pembangunan komunitas. Akan tetapi, masih sedikit penelitian yang menjelaskan hubungan antara modal sosial, pembelajaran kolektif, dan pembentukan kapasitas inovasi kolektif dalam suatu komunitas.

2.5.4 Penelitian tentang Keberlanjutan Komunitas

Keberlanjutan komunitas merupakan tema yang semakin banyak mendapat perhatian dalam studi pembangunan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan.

Magis (2010) menjelaskan bahwa keberlanjutan komunitas merupakan kemampuan masyarakat mempertahankan kualitas hidup melalui tindakan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan. Emery dan Flora (2006) menunjukkan bahwa keberlanjutan komunitas dipengaruhi oleh interaksi berbagai bentuk modal komunitas yang saling memperkuat satu sama lain.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan Triple Bottom Line yang berfokus pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian yang mengintegrasikan dimensi spiritual, kultural, dan kelembagaan secara simultan masih relatif terbatas, terutama dalam konteks komunitas berbasis masyarakat di negara berkembang.

Sintesis

Literatur keberlanjutan telah berkembang secara luas, namun masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan keberlanjutan komunitas secara multidimensional

yang mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan secara terpadu.

2.5.5 Sintesis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi empat kecenderungan utama.

Pertama, penelitian mengenai nilai telah menunjukkan pentingnya nilai dalam membentuk partisipasi dan solidaritas sosial, tetapi belum menjelaskan hubungan nilai dengan pembentukan modal sosial.

Kedua, penelitian mengenai modal sosial menunjukkan bahwa trust, norma sosial, dan jaringan sosial berkontribusi terhadap keberhasilan komunitas, tetapi belum menjelaskan mekanisme transformasi modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif.

Ketiga, penelitian mengenai inovasi sosial menjelaskan pentingnya inovasi dalam pembangunan komunitas, tetapi belum banyak menjelaskan proses sosial yang memungkinkan inovasi tersebut berkembang secara berkelanjutan.

Keempat, penelitian mengenai keberlanjutan komunitas masih didominasi pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga belum mampu menjelaskan keberlanjutan multidimensi yang mencakup aspek spiritual, kultural, dan kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi ruang kosong (research space) melalui pengembangan model yang menjelaskan transformasi: Dalam konteks komunitas Payungi, keberlanjutan multidimensi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui suatu mekanisme transformasi sosial yang berlangsung secara bertahap. Proses tersebut diawali oleh integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang menjadi landasan bersama dalam membangun orientasi dan identitas kolektif komunitas. Integrasi nilai ini kemudian melahirkan modal sosial yang tercermin dalam hubungan *bonding*, *bridging*, dan *linking* antarpelaku komunitas. Modal sosial yang kuat selanjutnya menumbuhkan trust (kepercayaan) antaranggota dan

pemangku kepentingan, yang memperkuat *collective efficacy* (efikasi kolektif) atau keyakinan bersama terhadap kemampuan komunitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kepercayaan dan efikasi kolektif tersebut mendorong terbentuknya *collaborative learning* (pembelajaran kolaboratif) melalui proses berbagi pengalaman, pengetahuan, refleksi, dan adaptasi bersama. Melalui pembelajaran kolaboratif, komunitas mengembangkan kapasitas inovasi kolektif yang memungkinkan terciptanya berbagai solusi kreatif, mobilisasi sumber daya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pada akhirnya, kapasitas inovasi kolektif tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya keberlanjutan multidimensi yang mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan dalam komunitas Payungi.

2.6 Research Gap, State of the Art, dan Posisi Penelitian

2.6.1 Theoretical Gap

Kajian teoritik menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat, modal sosial, inovasi sosial, dan keberlanjutan komunitas merupakan bidang kajian yang telah berkembang secara luas. Namun demikian, teori-teori tersebut umumnya berkembang secara parsial dan belum terintegrasi dalam satu kerangka konseptual yang menjelaskan proses transformasi sosial secara utuh.

Teori modal sosial menjelaskan bagaimana jaringan, norma, dan kepercayaan memengaruhi tindakan kolektif, tetapi belum menjelaskan sumber pembentukan modal sosial itu sendiri. Di sisi lain, teori inovasi sosial menjelaskan bagaimana solusi sosial baru muncul, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai mekanisme yang menghubungkan modal sosial dengan kapasitas inovasi kolektif.

Demikian pula, teori keberlanjutan yang dominan masih berorientasi pada pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga belum mampu menjelaskan keberlanjutan komunitas yang berakar pada nilai, budaya, dan kelembagaan lokal.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kerangka teoritik yang mampu menjelaskan hubungan antara integrasi nilai, modal sosial, kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi secara lebih komprehensif.

2.6.2 Empirical Gap

Dari sisi empiris, sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis hubungan antara dua atau tiga variabel tertentu secara terpisah. Penelitian mengenai nilai dan modal sosial, modal sosial dan inovasi sosial, maupun inovasi sosial dan keberlanjutan umumnya dilakukan secara parsial.

Penelitian yang secara khusus menjelaskan mekanisme transformasi integrasi nilai menjadi modal sosial, modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif, serta kapasitas inovasi kolektif menjadi keberlanjutan multidimensi masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks komunitas berbasis masyarakat di Indonesia.

Selain itu, penelitian mengenai Komunitas Payungi selama ini lebih banyak menyoroti aspek ekonomi kreatif, pariwisata berbasis komunitas, dan pengembangan pasar rakyat. Kajian yang menjelaskan proses sosial yang mendasari keberhasilan dan keberlanjutan komunitas tersebut masih belum banyak dilakukan.

2.6.3 Methodological Gap

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan pola hubungan statistik, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan proses, dinamika, dan mekanisme sosial yang melatarbelakangi hubungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses transformasi sosial yang berlangsung dalam komunitas. Pendekatan ini memberikan peluang untuk memahami bagaimana nilai diinternalisasi, bagaimana modal sosial dibangun,

bagaimana inovasi berkembang, dan bagaimana keberlanjutan komunitas dipertahankan dari perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung.

2.6.4 Posisi Penelitian

Posisi penelitian ini berada pada irisan empat bidang kajian utama:

1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas;
2. Modal Sosial;
3. Inovasi Sosial;
4. Keberlanjutan Komunitas.

Penelitian ini mengintegrasikan keempat bidang tersebut ke dalam satu model transformasi sosial yang menjelaskan bagaimana integrasi nilai membentuk modal sosial, bagaimana modal sosial menghasilkan kapasitas inovasi kolektif, dan bagaimana kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan multidimensi komunitas.

2.6.5 *State of the Art*

State of the art penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif *Value-Embedded Social Innovation (VESI)* yang memandang bahwa inovasi sosial yang berkelanjutan tidak tumbuh secara spontan, tetapi berakar pada integrasi nilai yang hidup dalam komunitas.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menempatkan nilai, modal sosial, inovasi sosial, dan keberlanjutan sebagai konsep yang berdiri sendiri, penelitian ini mengintegrasikan seluruh konsep tersebut ke dalam satu mekanisme transformasi sosial yang utuh.

Melalui perspektif VESI, penelitian ini menawarkan penjelasan baru bahwa keberlanjutan multidimensi komunitas merupakan hasil dari proses transformasi yang dimulai dari integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, berkembang menjadi modal sosial, dikonversi menjadi kapasitas inovasi kolektif, dan menghasilkan keberlanjutan komunitas yang bersifat multidimensional.

2.7 Kerangka Konseptual *Value-Embedded Social Innovation* (VESI)

2.7.1 Latar Belakang Pengembangan Konsep VESI

Kajian teoritik mengenai pemberdayaan masyarakat, modal sosial, inovasi sosial, dan keberlanjutan komunitas menunjukkan bahwa keempat konsep tersebut memiliki hubungan yang erat. Namun demikian, sebagian besar teori dan penelitian terdahulu masih menjelaskan hubungan tersebut secara parsial dan terfragmentasi. Teori pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi dan peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi belum menjelaskan secara rinci bagaimana kapasitas tersebut berkembang menjadi inovasi sosial yang berkelanjutan. Teori modal sosial menjelaskan pentingnya kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam tindakan kolektif, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai sumber pembentukan modal sosial itu sendiri. Demikian pula, teori inovasi sosial lebih banyak menjelaskan proses penciptaan solusi sosial baru tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan sistem nilai yang hidup dalam komunitas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun suatu perspektif yang mampu menjelaskan hubungan antara nilai, modal sosial, inovasi sosial, dan keberlanjutan komunitas secara lebih terintegrasi. Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan suatu perspektif konseptual yang disebut *Value-Embedded Social Innovation* (VESI).

VESI berangkat dari asumsi bahwa inovasi sosial yang berkelanjutan tidak muncul secara spontan dan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknis atau ketersediaan sumber daya ekonomi. Sebaliknya, inovasi sosial tumbuh dari sistem nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan komunitas dan kemudian diwujudkan melalui hubungan sosial, pembelajaran kolektif, serta tindakan bersama yang menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, VESI memandang nilai sebagai fondasi utama yang membentuk modal sosial, modal sosial sebagai sumber daya kolektif yang memungkinkan terjadinya inovasi, dan inovasi sosial sebagai mekanisme yang menghasilkan keberlanjutan multidimensi komunitas.

2.7.2 Integrasi Nilai sebagai Fondasi Transformasi Sosial

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa modal sosial tidak terbentuk dalam ruang sosial yang kosong. Kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial berkembang dari sistem nilai yang dihayati dan dipraktikkan oleh anggota komunitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, integrasi nilai dipahami sebagai proses internalisasi dan aktualisasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang membentuk orientasi tindakan komunitas.

Nilai spiritual mencerminkan orientasi moral yang berlandaskan keikhlasan, amanah, kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Nilai sosial mencerminkan semangat gotong royong, solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, nilai ekonomi mencerminkan orientasi produktivitas, kemandirian, kreativitas, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Ketiga nilai tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk sistem makna yang menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan integrasi nilai sebagai fondasi utama dalam proses transformasi sosial komunitas.

2.7.3 Modal Sosial sebagai Hasil Integrasi Nilai

Integrasi nilai yang berlangsung secara konsisten dalam kehidupan komunitas menghasilkan modal sosial yang tercermin dalam kepercayaan, norma timbal balik, serta jaringan sosial yang berkembang di antara anggota komunitas.

Dalam perspektif penelitian ini, modal sosial dipahami melalui tiga dimensi utama yang dikembangkan Woolcock (2001), yaitu:

1. *Bonding Social Capital;*
2. *Bridging Social Capital;*
3. *Linking Social Capital.*

Bonding social capital memperkuat kohesi internal komunitas. Bridging social capital memperluas hubungan horizontal lintas kelompok. Linking social capital menghubungkan komunitas dengan berbagai aktor eksternal yang memiliki sumber daya dan otoritas yang lebih besar.

Ketiga dimensi tersebut menjadi sumber daya sosial yang memungkinkan komunitas mengorganisasi tindakan kolektif dan membangun kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

2.7.4 Mekanisme Transformasi Modal Sosial

Penelitian ini berargumentasi bahwa modal sosial tidak secara otomatis menghasilkan inovasi sosial. Terdapat mekanisme sosial yang menjembatani proses transformasi tersebut.

Berdasarkan sintesis teori Bandura (2000), Wenger (1998), dan Nahapiet dan Ghoshal (1998), penelitian ini mengidentifikasi tiga mekanisme transformasi utama, yaitu:

a. Trust

Trust memungkinkan anggota komunitas membangun hubungan yang terbuka dan saling mendukung. Kepercayaan menjadi prasyarat bagi pertukaran informasi, kerja sama, dan eksperimen sosial yang diperlukan dalam proses inovasi.

b. Collective Efficacy

Collective efficacy merupakan keyakinan bersama bahwa komunitas memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keyakinan ini mendorong masyarakat untuk bertindak secara kolektif dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

c. Collaborative Learning

Collaborative learning memungkinkan pengalaman individu ditransformasikan menjadi pengetahuan kolektif melalui proses belajar bersama. Mekanisme ini

menjadi sarana utama bagi komunitas untuk menghasilkan ide-ide baru dan mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga mekanisme tersebut berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan modal sosial dengan kapasitas inovasi kolektif.

2.7.5 Kapasitas Inovasi Kolektif sebagai Dynamic Capability Komunitas

Melalui *trust*, *collective efficacy*, dan *collaborative learning*, komunitas mengembangkan kapasitas inovasi kolektif yang memungkinkan mereka menghasilkan solusi sosial secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif dipahami sebagai bentuk *dynamic capability* pada level komunitas. Sebagaimana dijelaskan Teece (2007), *dynamic capability* mencakup kemampuan *sensing*, *seizing*, dan *transforming*.

Pada tingkat komunitas, *sensing* tercermin dalam kemampuan mengenali kebutuhan dan peluang sosial. *Seizing* tercermin dalam kemampuan memobilisasi sumber daya untuk merespons peluang tersebut. *Transforming* tercermin dalam kemampuan melakukan adaptasi dan perubahan secara berkelanjutan.

Kapasitas inovasi kolektif memungkinkan komunitas tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga mempertahankan dan mengembangkan inovasi tersebut sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi.

2.7.6 Keberlanjutan Multidimensi sebagai Outcome

Kapasitas inovasi kolektif yang berkembang dalam komunitas pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan multidimensi.

Berbeda dengan pendekatan keberlanjutan konvensional yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, penelitian ini mengembangkan perspektif keberlanjutan yang lebih komprehensif dengan memasukkan enam dimensi utama, yaitu:

1. Keberlanjutan Spiritual;
2. Keberlanjutan Sosial;
3. Keberlanjutan Ekonomi;
4. Keberlanjutan Kultural;
5. Keberlanjutan Kelembagaan;
6. Keberlanjutan Lingkungan.

Keenam dimensi tersebut dipahami sebagai hasil dari proses transformasi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dalam komunitas.

2.7.7 Faktor Kontekstual sebagai Enabling Ecosystem

Seluruh proses transformasi yang dijelaskan dalam model VESI berlangsung dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan faktor kontekstual yang terdiri atas:

1. Dimensi Institusional;
2. Dimensi Relasional;
3. Dimensi Kultural.

Dimensi institusional mencakup dukungan kebijakan, regulasi, legitimasi sosial, dan akses terhadap sumber daya. Dimensi relasional mencakup kualitas hubungan sosial, kepemimpinan, dan kolaborasi antaraktor. Dimensi kultural mencakup nilai budaya, identitas lokal, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga dimensi tersebut berfungsi sebagai **enabling ecosystem** yang memperkuat atau melemahkan proses transformasi dari integrasi nilai menuju keberlanjutan multidimensi.

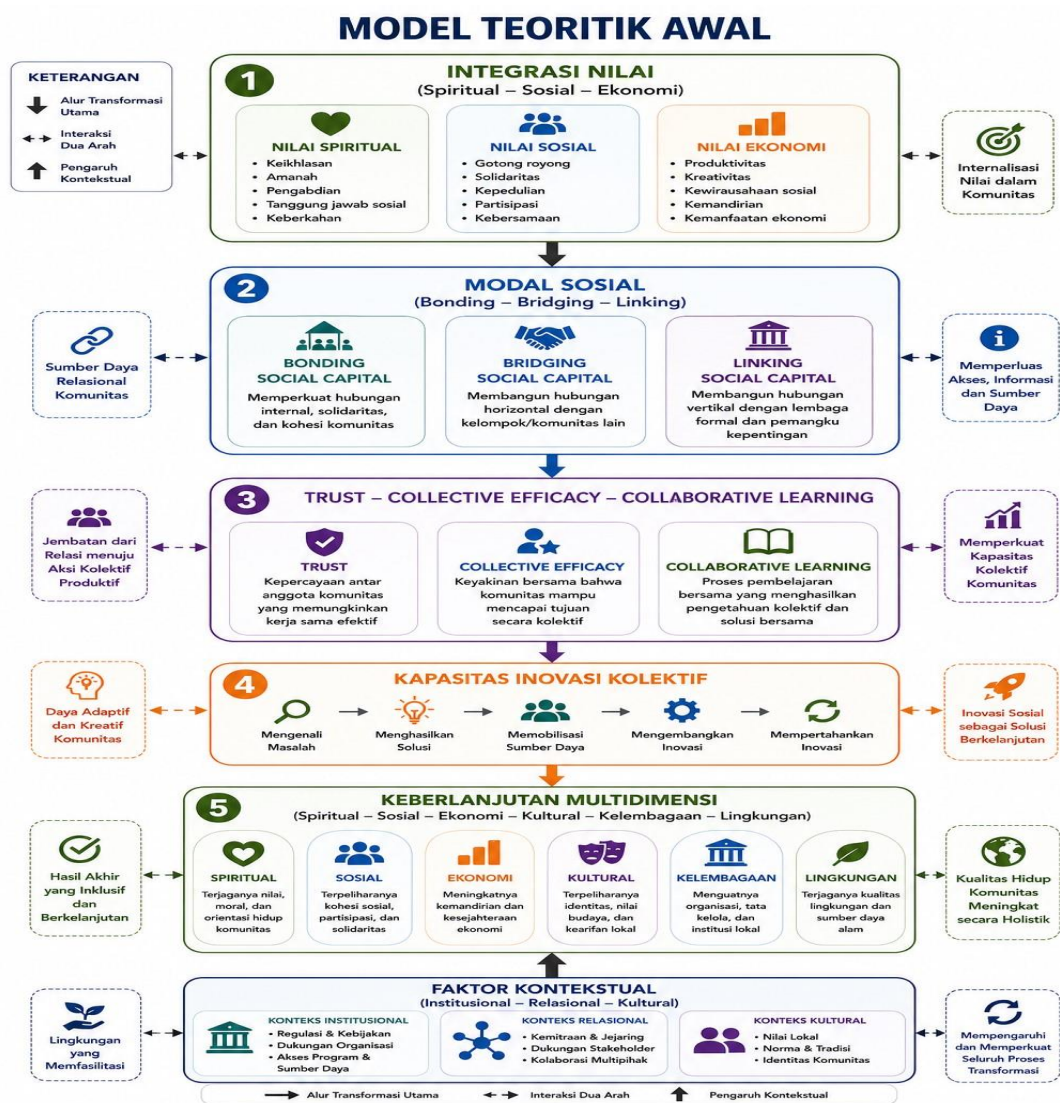
2.7.8 Definisi Konseptual *Value-Embedded Social Innovation* (VESI)

Berdasarkan sintesis seluruh teori yang digunakan, penelitian ini mendefinisikan Value-Embedded Social Innovation (VESI) sebagai:

"Proses transformasi sosial berbasis komunitas yang berakar pada integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, diwujudkan melalui pembentukan modal sosial, ditransformasikan menjadi kapasitas inovasi kolektif melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning, serta menghasilkan keberlanjutan multidimensi dalam konteks institusional, relasional, dan kultural tertentu."

Definisi tersebut menjadi landasan konseptual bagi pengembangan Model Pancadaya yang akan dirumuskan berdasarkan temuan empiris penelitian.

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses sosial yang terjadi dalam Komunitas Payungi, khususnya bagaimana nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi diintegrasikan ke dalam praktik pemberdayaan masyarakat sehingga membentuk modal sosial, mengembangkan kapasitas inovasi kolektif, dan menghasilkan keberlanjutan multidimensi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna, pengalaman, interpretasi, dan konstruksi sosial yang dibangun oleh para aktor komunitas. Fokus penelitian bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel, melainkan menjelaskan mekanisme sosial yang menghubungkan integrasi nilai dengan keberlanjutan komunitas.

Desain studi kasus dipilih karena Payungi merupakan kasus yang unik dan menarik untuk dipahami secara mendalam. Selama lebih dari tujuh tahun, Payungi menunjukkan kemampuan mempertahankan keberlanjutan organisasi, ekonomi komunitas, kohesi sosial, dan inovasi sosial berbasis masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan Payungi sebagai kasus yang relevan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai *Value-Embedded Social Innovation (VESI)*.

3.2 Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Komunitas Payungi yang berlokasi di Kota Metro, Provinsi Lampung. Payungi merupakan komunitas pemberdayaan masyarakat yang berkembang melalui berbagai aktivitas ekonomi kreatif, pelestarian budaya lokal, penguatan jejaring sosial, dan pengembangan inovasi berbasis komunitas.

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, Payungi memiliki rekam jejak keberlanjutan yang relatif panjang dibandingkan berbagai inisiatif komunitas sejenis. Kedua, Payungi menunjukkan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Ketiga, komunitas ini berkembang dalam lingkungan sosial yang heterogen sehingga memberikan konteks yang kaya untuk memahami proses pembentukan modal sosial dan inovasi kolektif.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam aktivitas komunitas.

Informan penelitian terdiri (a)Pendiri dan pengelola Payungi(b)Anggota inti komunitas (c)Pedagang dan pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas Payungi, (d)Tokoh masyarakat dan tokoh agama,(e)Mitra eksternal, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendukung (f)Masyarakat penerima manfaat.

Jumlah informan tidak ditentukan secara statistik, tetapi mengikuti prinsip saturation atau kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak menghasilkan temuan substantif baru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

3.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, nilai, dan interpretasi para informan terkait proses pemberdayaan yang berlangsung dalam komunitas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga memungkinkan eksplorasi isu-isu yang berkembang selama proses penelitian.

Fokus wawancara meliputi integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi; pembentukan modal sosial; proses munculnya inovasi kolektif; serta faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan komunitas.

3.4.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan komunitas. Peneliti melihat, mengamati secara langsung berbagai aktivitas Payungi selama kurang lebih tiga bulan sehingga memperoleh pemahaman kontekstual mengenai pola interaksi, budaya organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi arsip organisasi, laporan kegiatan, dokumen legalitas, publikasi media, foto kegiatan, laporan keuangan, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan perkembangan Payungi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi: (1)Kondensasi data, (2)Penyajian data, (3)Penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data berlangsung. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan integrasi nilai, modal sosial, kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi.

Selanjutnya dilakukan analisis tematik untuk menemukan pola hubungan antartema dan menjelaskan mekanisme yang menghubungkan seluruh konstruksi konseptual penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengembangan model Value-Embedded Social Innovation (VESI).

3.6 Triangulasi sebagai Metode Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar merepresentasikan realitas yang diteliti. Salah satu kriteria utama keabsahan data adalah kredibilitas (*credibility*), yaitu tingkat keyakinan bahwa hasil penelitian menggambarkan secara akurat pengalaman, pandangan, dan makna yang dimiliki oleh para partisipan. Kredibilitas menunjukkan bahwa interpretasi yang dibangun peneliti tidak sekadar merupakan asumsi subjektif, melainkan bersumber dari data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti menerapkan dua strategi utama, yaitu keterlibatan jangka panjang (*prolonged engagement*) dan triangulasi (*triangulation*). Keterlibatan jangka panjang dilakukan melalui kehadiran peneliti di lapangan selama kurang lebih tiga bulan. Periode tersebut memberikan kesempatan kepada peneliti untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan informan, memahami konteks sosial dan budaya komunitas secara lebih mendalam, serta mengamati dinamika yang terjadi secara berulang. Melalui keterlibatan yang berkelanjutan, peneliti dapat membedakan informasi yang bersifat sementara dengan pola-pola yang benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, kehadiran yang relatif lama membantu mengurangi kemungkinan munculnya informasi yang bersifat artifisial akibat pengaruh kehadiran peneliti.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik utama untuk menguji dan memperkuat keabsahan data. Triangulasi merupakan proses pemeriksaan silang (*cross-checking*) terhadap data melalui penggunaan berbagai sumber, metode, dan perspektif sehingga temuan yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu jenis data atau satu informan tertentu. Melalui triangulasi, peneliti dapat membandingkan, mengonfirmasi, dan memverifikasi informasi yang diperoleh sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian menjadi lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui beberapa bentuk. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, seperti pendiri komunitas, pengelola, anggota komunitas, pedagang, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak eksternal yang memiliki hubungan dengan komunitas. Perbandingan berbagai perspektif tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Kedua, triangulasi metode, yaitu memadukan berbagai teknik pengumpulan data yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara tidak langsung diterima sebagai fakta, tetapi diverifikasi melalui hasil observasi lapangan dan dokumen yang relevan. Sebaliknya, temuan observasi juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan informan yang terkait. Ketiga, triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu dan situasi yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh. Pendekatan ini penting karena dinamika sosial dalam komunitas dapat berubah sesuai dengan konteks kegiatan, interaksi antaranggota, maupun kondisi lingkungan yang melingkupinya.

Melalui penerapan keterlibatan jangka panjang dan triangulasi secara sistematis, penelitian ini berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian mengenai mekanisme integrasi nilai, pembentukan modal sosial, pengembangan kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan komunitas dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan temuan penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk orientasi kolektif komunitas Payungi melalui penciptaan makna bersama (shared meaning), visi bersama (shared vision), dan komitmen kolektif terhadap tujuan komunitas. Nilai spiritual menjadi sumber motivasi moral, nilai sosial memperkuat solidaritas dan gotong royong, sedangkan nilai ekonomi berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Integrasi ketiga nilai tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya tindakan kolektif yang berkelanjutan.
2. Keberlanjutan Payungi dipengaruhi oleh interaksi faktor institusional, relasional, dan kultural. Faktor institusional memberikan legitimasi dan akses sumber daya, faktor relasional memperkuat jaringan kolaborasi dan kemitraan, sedangkan faktor kultural menjaga reproduksi nilai, norma, dan identitas komunitas. Ketiga faktor tersebut membentuk konteks yang mendukung keberlanjutan inovasi sosial komunitas.
3. Modal sosial Payungi berkembang melalui kombinasi bonding, bridging, dan linking social capital. Bonding memperkuat kohesi internal komunitas, bridging memperluas hubungan dengan kelompok lain, sedangkan linking membuka akses terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan dari aktor eksternal. Ketiga bentuk modal sosial tersebut saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas komunitas.

4. Trust, collective efficacy, dan collaborative learning berperan sebagai mekanisme transformasi yang mengubah modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif. Kepercayaan menciptakan rasa aman untuk berkolaborasi, efikasi kolektif membangun keyakinan terhadap kemampuan bersama, sedangkan pembelajaran kolaboratif memungkinkan pertukaran pengetahuan, refleksi, dan adaptasi berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, komunitas mampu menghasilkan dan mengembangkan inovasi sosial secara terus-menerus.
5. Kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan multidimensi komunitas. Kapasitas tersebut memungkinkan Payungi menciptakan berbagai inovasi sosial, memperluas partisipasi masyarakat, mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan komunitas, melestarikan budaya lokal, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Keberlanjutan yang dihasilkan mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan.
6. Pengalaman Payungi direkonstruksi menjadi Model Value-Embedded Social Innovation–Pancadaya (VESI–Pancadaya) yang menjelaskan keberlanjutan komunitas sebagai hasil interaksi tiga lapisan yang saling terintegrasi. Lapisan pertama adalah mekanisme transformasi sosial yang menunjukkan bahwa integrasi nilai membentuk modal sosial yang ditransformasikan melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning menjadi kapasitas inovasi kolektif yang menghasilkan keberlanjutan multidimensi. Lapisan kedua adalah lintasan perkembangan komunitas melalui konsep Pancadaya yang terdiri atas Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan. Lapisan ketiga adalah tujuh prinsip transferable dalam kerangka PKIM-SIS, yaitu Human-First Principle, Collective Leadership Principle, Spiritual-Economic Integration Principle, Inclusive Local Economy Principle, Participatory Governance Principle, Continuous Innovation Principle, dan Strategic Independence Principle. Model ini memberikan kerangka konseptual baru untuk memahami dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat berbasis

inovasi sosial pada konteks komunitas semi-urban di Indonesia dan Global South.

5.2 Implikasi Penelitian

A. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis penting bagi pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, dan modal sosial.

Pertama, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan dan keberlanjutan inovasi sosial tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor ekonomi, kelembagaan, atau jaringan sosial, tetapi harus dipahami sebagai hasil integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang membentuk orientasi kolektif komunitas. Temuan ini memperluas literatur inovasi sosial dengan menempatkan nilai sebagai fondasi utama proses transformasi sosial.

Kedua, penelitian ini memperkaya teori modal sosial dengan menunjukkan bahwa modal sosial tidak secara otomatis menghasilkan inovasi maupun keberlanjutan. Pengaruh modal sosial dimediasi oleh tiga mekanisme utama, yaitu trust, collective efficacy, dan collaborative learning, yang berfungsi mengonversi sumber daya relasional menjadi kapasitas inovasi kolektif.

Ketiga, penelitian ini memperluas kajian community development melalui pengembangan konsep Pancadaya sebagai lintasan perkembangan komunitas yang menjelaskan proses transformasi dari kesadaran kolektif menuju kesejahteraan yang berkelanjutan melalui tahapan Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan.

Keempat, penelitian ini menghasilkan Model VESI–Pancadaya sebagai kerangka konseptual integratif yang menghubungkan teori inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, dan pembangunan komunitas ke dalam satu model yang menjelaskan mekanisme keberlanjutan komunitas pada konteks semi-urban.

Kelima, penelitian ini memperkenalkan PKIM-SIS sebagai seperangkat transferable design principles yang dapat digunakan untuk menjelaskan maupun mengembangkan keberhasilan inovasi sosial berbasis komunitas pada berbagai konteks masyarakat di Indonesia dan Global South.

B. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

Bagi pemerintah, Model VESI–Pancadaya menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang berfokus pada penguatan kapasitas komunitas, pengembangan modal sosial, dan pengintegrasian nilai lokal, bukan sekadar penyediaan bantuan atau intervensi berbasis proyek.

Bagi organisasi pemberdayaan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil, model ini menyediakan kerangka praktis untuk merancang program yang menekankan pembangunan kepercayaan, pembelajaran kolaboratif, kepemimpinan kolektif, dan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Bagi komunitas lokal, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dibangun melalui penguatan nilai bersama, pemanfaatan aset lokal, pengembangan jejaring sosial, serta penciptaan ruang kolaborasi yang memungkinkan tumbuhnya inovasi kolektif.

Bagi perguruan tinggi, Model VESI–Pancadaya dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan model pemberdayaan berbasis inovasi sosial yang kontekstual.

Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, tujuh prinsip PKIM-SIS dapat dijadikan referensi dalam merancang strategi pengembangan komunitas yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Pertama, penelitian dilakukan pada satu kasus komunitas sehingga temuan lebih ditujukan untuk generalisasi analitis daripada generalisasi statistik.

Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hubungan antar konstruk dalam Model VESI–Pancadaya belum diuji secara empiris melalui pendekatan kuantitatif atau mixed methods.

Ketiga, konteks penelitian berada pada komunitas semi-urban sehingga penerapan model pada konteks perkotaan besar, pedesaan, maupun wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda memerlukan pengujian lebih lanjut.

Keempat, penelitian lebih berfokus pada faktor-faktor yang menjelaskan keberhasilan dan keberlanjutan komunitas sehingga belum mengkaji secara mendalam dinamika konflik, resistensi, maupun kegagalan inovasi sosial yang mungkin terjadi dalam proses pengembangan komunitas.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi, dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut.

A. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas, bukan semata-mata pada pemberian bantuan atau dukungan finansial jangka pendek.
2. Program pemberdayaan perlu mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang agar mampu membangun orientasi kolektif dan keberlanjutan komunitas.

3. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif yang memperkuat hubungan antara komunitas, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

B. Rekomendasi Praktik Pemberdayaan

1. Komunitas yang ingin mengembangkan inovasi sosial perlu memulai proses pemberdayaan dari identifikasi aset lokal dan penguatan nilai bersama sebagai fondasi tindakan kolektif.
2. Pengembangan modal sosial perlu diarahkan secara seimbang pada penguatan bonding, bridging, dan linking social capital agar komunitas memiliki kohesi internal sekaligus akses terhadap sumber daya eksternal.
3. Organisasi pemberdayaan disarankan menerapkan prinsip-prinsip PKIM-SIS sebagai pedoman dalam membangun komunitas yang inklusif, partisipatif, inovatif, dan mandiri.

C. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

1. Penelitian selanjutnya perlu menguji Model VESI–Pancadaya secara kuantitatif untuk mengukur hubungan antar konstruk dan menguji validitas model pada populasi yang lebih luas.
2. Penelitian komparatif pada berbagai komunitas semi-urban di Indonesia maupun negara Global South diperlukan untuk menguji transferabilitas model dan prinsip PKIM-SIS.
3. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran konflik, kepemimpinan, transformasi digital, serta dinamika kekuasaan dalam proses inovasi sosial dan keberlanjutan komunitas.
4. Konsep Pancadaya dan PKIM-SIS perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam berbagai studi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2002). Indigenous knowledge and the politics of development. *Critique of Anthropology*, 22(2), 141-164.
- Agrawal, A., & Chhatre, A. (2006). Explaining success on the commons: Community forest governance in the Indian Himalaya. *World Development*, 34(1), 149-166.
- Agrawal, A., Nepstad, D., & Chhatre, A. (2015). Reducing emissions from deforestation and forest degradation. *Annual Review of Environment and Resources*, 36, 373-396.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Argyris, C. (1999). *On organizational learning* (2nd ed.). Blackwell Business.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Arocena, R., & Sutz, J. (2010). Inequality and innovation: A Latin American perspective. *Technology in Society*, 32(3), 154-162.
- Audretsch, D. B., & Keilbach, M. (2007). The localisation of entrepreneurship capital: Evidence from Germany. *Papers in Regional Science*, 86(3), 351-365.
- Austin, J. E., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both? *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 30(1), 1-22.
- Avelino, F., Grin, J., Pel, B., & Jhagroe, Y. (2022). Transformative social innovation and plural politics: Beyond the either/or. *GLOCALISM: Journal of Culture, Politics and Innovation*, 7(1), 1-16.
- Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. *Current Directions in Psychological Science*, 9(3), 75-78.

- Bandura, A. (2006). Toward a Psychology of Human Agency. *Perspectives on Psychological Science*, 1(2), 164–180.
- Bass, B. M. (1990). *Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications* (3rd ed.). Free Press.
- Ben Chikha, I., Plaskoff, M., & Mair, J. (2025). Social innovation through government action: A comparative study. *Journal of Social Entrepreneurship*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- Berkes, F., & Folke, C. (1998). *Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience*. Cambridge University Press.
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20.
- Berman, R., & Sobieraj, S. (2015). Bridging social capital and civic participation: The dynamics of trust in America. *Journal of Civic Engagement*, 44(2), 234-258.
- Bhaskar, R. (2008). *A realist theory of science* (new ed.). Routledge.
- Bolzan, M., Falk, I., & Harreveld, B. (2019). Resilience and capacity: Examining the relationship between communities and sustainability. *Community Development Journal*, 54(2), 231-249.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bradach, J. (2010). Scaling impact. *Stanford Social Innovation Review*, 8(1), 40-46.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Menggunakan analisis tematik dalam psikologi. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-based policy: A practical guide to doing it better*. Oxford University Press.

- Castells, M. (2009). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R. (2005). *Ideas for development*. Earthscan.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper No. 296). Institute of Development Studies.
- Checkland, P. B. (1981). *Systems thinking, systems practice*. John Wiley & Sons.
- Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.
- Christens, B. D. (2012). Targeting empowerment in community development: A community psychology approach to enhancing local power and well-being. *Community Development Journal*, 47(4), 538–554. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsr047>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Suppl.), S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Collins, J. (2001). *Good to great: Why some companies make the leap and others don't*. HarperBusiness.
- Comte, A. (1988). *Introduction to positive philosophy*. Hackett Publishing.
- Connell, J. P., & Kubisch, A. C. (1998). Applying a theory of change approach. In Aspen Institute (Ed.), *New approaches to evaluating community initiatives*. Aspen Institute.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (edisi 5). Sage Publications.
- Crotty, M. (1998). *Fondasi penelitian sosial: Makna dan perspektif dalam proses penelitian*. Sage Publications.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum Press.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101> (SCIRP)
- Durkheim, É. (2013). *The division of labor in society*. Dover Publications.
- Duxbury, N., Cullen, C., & Pascual, J. (2012). Cities, culture and sustainable development. In *The sustainable city VI* (pp. 73–86). WIT Press.
- Easterly, W. (2006). *The white man's burden: Why the West's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good*. Penguin Press.
- Edquist, C. (1997). *Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations*. Pinter.
- Eichler, M., & Schwarz, J. (2019). Social innovation as a tool for sustainable development. *Innovation and Development*, 9(1), 23-40.
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They? *Strategic Management Journal*, 21(10–11), 1105–1121.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Emery, M., & Flora, C. (2006). Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework. *Community Development: Journal of the Community Development Society*, 37(1), 19–35. <https://doi.org/10.1080/15575330609490152>
- Emery, M., & Flora, C. B. (2006). Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework. *Community Development Journal*, 37(1), 19-35.
- Farinha, L. B., Ferreira, J. J., & Nunes, S. (2020). Social entrepreneurship and innovation: A bibliometric analysis. *European Journal of Innovation Management*, 23(1), 1-30.
- Finger, M., & Asún, J. M. (2001). *Adult education at the crossroads: Learning our way out*. Zed Books.
- Flora, C. B., & Flora, J. L. (2013). *Rural communities: Legacy and change* (5th ed.). Westview Press.
- Flora, C. B., & Flora, J. L. (2013). *Rural communities: Legacy and change* (4th ed.). Westview Press.

- Fraser, N. (2008). *Adding insult to injury: Nancy Fraser debates her critics*. Verso.
- Fraser, N. (2008). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Columbia University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. Bergman Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, F. (2001). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *Penemuan teori berdasarkan data: Strategi penelitian kualitatif*. Aldine.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311> (Chicago Journals)
- Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380.
- Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. *The Leadership Quarterly*, 13(4), 423–451. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(02\)00120-0](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00120-0)
- Gronn, P. (2002). Distributed leadership. *Educational Management Administration Leadership*, 29(4), 465-486.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). Sage Publications.
- Hall, M. H., & O'Dwyer, B. (2017). Integrating sustainability reporting into management systems: A literature review. *Journal of Cleaner Production*, 136(Part A), 5-15.

- Harriss, J., & De Renzio, P. (1997). Missing link or analytically missing? The concept of social capital. *Journal of International Development*, 9(7), 919-937.
- Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J., & Winter, S. G. (2007). *Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Holland, J. H. (1998). *Emergence: From chaos to order*. Oxford University Press.
- Howaldt, J., & Schwarz, J. (2017). Social innovation: Concepts, research fields and international trends. *Annals of Regional Science*, 61(3), 343-363.
- Isenberg, D. J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy and practice. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kabeer, N. (2005). The conditions and contexts of empowerment. *IDS Bulletin*, 26(4), 51-71.
- Keast, R., Brown, K., & Mandell, M. (2007). Getting the right people around the table: A relationship perspective on governance network performance. *Public Administration Review*, 67(s1), 56-66.
- Kegan, R. (1982). *The evolving self: Problem and process in human development*. Harvard University Press.
- Kretzmann, J., & McKnight, J. (1993). *Building communities from the inside out*. ACTA Publications.
- Larrain, J. (1986). *A reconstruction of historical materialism*. Allen and Unwin.
- Ledwith, M., & Asgill, P. (2007). Feminist, anti-racist community development: Critical alliance, local to global. In L. Dominelli (Ed.), *Revitalising communities in a globalising world* (pp. 107-122). Ashgate.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Inquiri naturalistik*. Sage Publications.
- Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. *Journal of Environmental Management*, 91(3), 754-766.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in systems: A primer*. Chelsea Green Publishing.

- Mehmood, A., Parra, C., & Arfvidsson, H. (2019). Social innovation in an unsustainable world. In A. Mehmood (Ed.), *Handbook of social innovation* (pp. 1-20). Edward Elgar Publishing.
- Mills, C. W. (2003). *The racial contract*. Cornell University Press.
- Moldan, B., Janoušková, S., & Hák, T. (2012). How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. *Ecological Indicators*, 17(1), 4-13.
- Morse, S., McNamara, N., & Acholo, M. (2001). Sustainability indicators: A research programme for land-use in the UK. *Soil Use and Management*, 17(3), 184-193.
- Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2013). *The International Handbook on Social Innovation*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Mulgan, G. (2019). *Big mind: How collective intelligence can change our world*. Princeton University Press.
- Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B. (2007). *Social innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated*. Skoll Centre for Social Entrepreneurship.
- Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). *The Open Book of Social Innovation*. London: Nesta.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. *Academy of Management Review*, 23(2), 242–266.
- Nakata, M. (2007). The cultural interface. *The Australian Journal of Indigenous Education*, 36(S1), 7-14.
- Narayan, D., & Pritchett, L. (1999). Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871-897.
- Neumeier, S. (2012). Why do social innovations in rural development matter? *European Countryside*, 4(4), 235-249.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.

- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.
- Ostrom, E. (2009). A polycentric approach for coping with climate change. World Bank Policy Research Working Paper.
- Ostrom, E. (2009). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action* (reprint ed.). Cambridge University Press.
- Parsons, T. (1966). *Societies: Comparative and evolutionary perspectives*. Prentice Hall.
- Patton, M. Q. (2015). *Metode penelitian dan evaluasi kualitatif* (edisi 4). Sage Publications.
- Pawson, R. (2013). *The science of evaluation: A realist perspective*. Sage Publications.
- Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. *Annual Review of Psychology*, 49(1), 65-85.
- Pintér, L., Swanson, D., Knuskal, A., & Valev, S. (2012). *Assessing progress toward sustainability: A systematic approach to measuring sustainable development*. International Institute for Sustainable Development.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1-24.
- Prasad, N. (2015). *Urban infrastructure in developing countries*. UNEP DTU Partnership.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137-174.
- Raelin, J. D. (2016). Toward an epistemology of practice. *Academy of Management Learning & Education*, 6(4), 495-519.
- Ramalingam, B. (2013). *Aid on the edge of chaos: Rethinking international cooperation in a complex world*. Oxford University Press.

- Ramalingam, B., Jones, H., Reba, T., & Young, J. (2011). Exploring the science of complexity: Ideas and implications for development and humanitarian efforts. Overseas Development Institute.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Reid, A. J., Eckert, L. E., Lane, J. F., Young, N., Hinch, S. G., Darimont, C. T., ... & Marshall, A. (2016). Co-management and indigenous peoples' rights in Canada. *Ecology and Society*, 21(1), 49.
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science*, 277(5328), 918–924.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. *Science*, 277(5328), 918–924.
- Sandel, M. J. (2012). *What money can't buy: The moral limits of markets*. Farrar, Straus and Giroux.
- Schein, E. H. (1990). Organizational culture. *American Psychologist*, 45(2), 109–119. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.2.109>
- Schroeder, R. (2008). *Web of life: A new science of networks*. Oxford University Press.
- Schumacher, E. F. (1973). *Small is beautiful: A study of economics as if people mattered*. Blond & Briggs.
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing.
- Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. *Great Minds in Management: The Process of Theory Development*, 37(2), 460-484.

- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Smith, E. (2016). The corporate veil and empowerment: Rethinking power in development. *Development and Change*, 47(4), 789-812.
- Soini, K., & Dessein, J. (2016). Culture-sustainability relation: Towards a conceptual framework. *Sustainability*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.3390/su8020167>
- Spencer, H. (1972). *The evolution of society*. University of Chicago Press.
- Spillane, J. P. (2006). *Distributed leadership*. Jossey-Bass.
- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271-313). University of Illinois Press.
- Stake, R. E. (1995). *Seni penelitian studi kasus*. Sage Publications.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28.
- Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? *American Review of Public Administration*, 36(1), 41-57.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Sultana, F. (2009). Fluid lives: Subjectivities, gender and water in rural Bangladesh. *Gender, Place and Culture*, 16(4), 427-444.
- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sztompka, P. (2004). *Trust: A sociological theory*. Cambridge University Press.
- Tacoli, C. (2003). The links between urban and rural development. *Environment and Urbanization*, 15(1), 3-12.
- Tacoli, C. (2015). Crisis, adaptation and social protection in the peri-urban interface: Learning from the food and financial crises. In *Crisis, Social Protection and Livelihoods: Experiences from East and Southern Africa* (pp. 157-169). Routledge.
- Tacoli, C., Chakrabarti, S., & Revi, A. (2015). *Urban development and rural-urban migration*. International Institute for Environment and Development.
- Tallman, P. (2013). Best practices in community-based development. *Community Development Review*, 8(2), 45-67.

- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of sustainable enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533.
- Tracey, P., & Stott, N. (2017). Social innovation A window on alternative ways of organizing and innovating. *Innovation: Management, Policy & Practice*, 5(1), 69-83.
- Tremblay, M. C., Diallo, Y. H., & Couture, L. (2021). Community empowerment and development: Theoretical frameworks and practical applications. *Journal of Community Development*, 52(3), 234-256.
- United Nations Development Programme (2015). Sustainable Development Goals: Transforming our world. UNDP.
- Van der Have, R. P., & Rubalcaba, L. (2016). Social innovation research: An emerging area of innovation studies? *Research Policy*, 45(9), 1923-1935.
- Von Bertalanffy, L. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Walker, R. M., Damanpour, F., & Devece, C. A. (2011). Management innovation and organizational performance: The mediating effect of performance management. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(2), 367-386.
- Walsham, G. (2002). Cross-cultural software production and use: A structural analysis. *MIS Quarterly*, 26(4), 359-380.
- Weber, M. (1968). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.; E. Fischhoff et al., Trans.). Bedminster Press.
- Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In J. P. Connell, A. C. Kubisch, L. B. Schorr, & C. H. Weiss (Eds.), *New approaches to evaluating community initiatives* (pp. 65-92). Aspen Institute.
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*. Boston: Harvard Business School Press.

- Westley, F., & Antadze, N. (2010). Making a difference: Strategies for scaling social innovation for greater impact. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 15(2), 1-19.
- Westley, F., & Vredenburg, H. (1997). Interorganizational collaboration and the ambidextrous organization. *Journal of Management Studies*, 34(5), 734-769.
- Westley, F., Olsson, P., Folke, C., Homer-Dixon, T., Vredenburg, H., Loorbach, D., Thompson, J., Nilsson, M., Lambin, E., Sendzimir, J., Banerjee, B., Galaz, V., & van der Leeuw, S. (2011/2014). *Tipping Toward Sustainability: Emerging Pathways of Transformation*. *Ambio*.
- Williams, A. M., Champion, J., Hall, M., & Wigglesworth, E. (2019). *Social capital and community economic development in rural areas: A comparative analysis*. Rural Studies Press.
- Winter, S. G. (2003). Understanding Dynamic Capabilities. *Strategic Management Journal*, 24(10), 991–995.
- Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Penelitian studi kasus dan aplikasinya: Desain dan metode (edisi 6)*. Sage Publications.
- Yunus, M., & Weber, K. (2007). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. PublicAffairs.
- Ziegler, R. (2017). *Shaping urban sustainability*. Urban Development and Management Series. Edward Elgar Publishing.
- Ziemnowicz, C. (2017). The evolution of entrepreneurship as a scholarly field. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 13(3), 147-161.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. Dalam J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (hlm. 43–63). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.